



NASIONAL

Disebut Gak Punya Urat Malu, 'Gibran Gak Bakal Mundur Kecuali Dimundurkan'

Oleh Redaksi · 26 Okt, 21.42 WIB



BANDA ACEH - Pegiat media sosial Bachrum Achmadi menyoroti desakan 150 akademisi yang tergabung dalam Forum Guru Besar Indonesia agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya.

Menurut Bachrum, permintaan tersebut tidak akan dihiraukan oleh Gibran. Ia menilai Gibran

dan ayahnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), sangat mementingkan kekuasaan dan jabatan. Karena itu, Bachrum meyakini Gibran tidak akan mundur secara sukarela dan hanya bisa lengser apabila dimundurkan.

"Forum Guru Besar mendesak Gibran mundur. Tapi cemanalah Jokowi & Keluarganya mana punya malu, mereka adlah peng-

hamba kekuasaan & jabatan," tulisnya di akun X pribadinya dikutip Senin (26/10).

"Gibran itu ga bakal mundur, kecuali dimundurkan, emang dia sama bpknya punya urat malu & etika. Ngimpi klen woy!" imbuhnya.

Sebelumnya, Forum Guru Besar Indonesia menerbitkan surat terbuka pada 19 Oktober 2026 yang

mendesak Gibran mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.

Para guru besar tersebut menyoroti aspek integritas akademik dan etika bernegara. Menurut mereka, polemik mengenai dokumen pendidikan pejabat negara yang dinilai bermasalah secara administratif dapat menyulitkan institusi pendidikan tinggi dalam ...

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Laporan Dugaan Penipuan Kripto Timothy Ronald Disetop, Polisi Sebut Tak Ditemukan Pidana



BANDA ACEH - Kasus dugaan penipuan investasi kripto yang sempat menyeret nama pendiri Akademi Crypto, Timothy Ronald, berujung pada penghentian dua laporan polisi. Polda

Metro Jaya memastikan penyelidikan atas kedua laporan tersebut telah disetop setelah penyidik melakukan gelar perkara.

Selengkapnya di halaman 3 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Geisz Khalifa Sindir Gibran: Sekatratronya Elu Waktu Sekolah, Pasti Ada yang Ingat!



BANDA ACEH - Loyalis Anies Baswedan, Geisz Khalifa, melayangkan sindiran tajam terkait kontroversi ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kini bergulir hingga Mahkamah Konstitusi (MK) dan usulan Hak Angket di DPR.

Selengkapnya di halaman 3 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



DALAM EDISI INI

NASIONAL	2
ACEH	12
SPORT	18
Aneka Berita	22

NASIONAL

Rugi BUMN Belum Tentu Korupsi, Pemerintah Sebut Harus Dilihat Niatnya!



BANDA ACEH - Perusahaan pelat merah merugi belum tentu berarti pengurusnya melakukan korupsi. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengingatkan perlunya membedakan kerugian

akibat risiko bisnis dengan kerugian yang muncul dari tindakan yang sejak awal dilandasi niat jahat.

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ADVERTORIAL

Bank Aceh

ActiOn

Selamat dan Sukses

ATAS PELANTIKAN DAN SERTIJAB

BRIGJEN TNI MAHESA FITRIADI, S.A.P., M.M.

Sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda

Oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat
JENDERAL TNI TANDYO BUDI REVITA

di Gedung AH Nasution,
Markas Besar TNI Angkatan Darat,
Jakarta Pusat,
pada hari Jumat, 16 Oktober 2026

Semoga dalam melaksanakan tugas
selalu mendapat rahmat dan petunjuk
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dan Terima Kasih Kepada
MAYJEN TNI JOKO HADI SUSILO, S.I.P.
Atas pengabdianya selama ini

Tertanda,
FADHIL ILYAS
Direktur Utama

www.bankaceh.co.id

Bank Aceh Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS

NASIONAL

21 BERITA

NASIONAL

Disebut Gak Punya Urat Malu, ‘Gibran Gak Bakal Mundur Kecuali Dimundurkan’

Oleh Redaksi · 26 Okt, 21.42 WIB



BANDA ACEH - Pegiat media sosial Bachrum Achmadi menyoroti desakan 150 akademisi yang tergabung dalam Forum Guru Besar Indonesia agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya.

Menurut Bachrum, permintaan tersebut tidak akan dihiraukan oleh Gibran. Ia menilai Gibran dan ayahnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), sangat mementingkan kekuasaan dan jabatan. Karena itu, Bachrum meyakini Gibran tidak akan

mundur secara sukarela dan hanya bisa lengser apabila dimundurkan.

"Forum Guru Besar mendesak Gibran mundur. Tapi cemanalah Jokowi & Keluarganya mana punya malu, mereka adlah penghamba kekuasaan & jabatan," tulisnya di akun X pribadinya dikutip Senin (26/10).

"Gibran itu ga bakal mundur, kecuali dimundurkan, emang dia sama bpknya punya urat malu & etika. Ngimpi klen woy!" imbuhnya.

Sebelumnya, Forum Guru Besar Indonesia menerbitkan surat ter-

buka pada 19 Oktober 2026 yang mendesak Gibran mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.

Para guru besar tersebut menyoroti aspek integritas akademik dan etika bernegara. Menurut mereka, polemik mengenai dokumen pendidikan pejabat negara yang dinilai bermasalah secara administratif dapat menyulitkan institusi pendidikan tinggi dalam menanamkan nilai kejujuran dan kepatuhan hukum kepada mahasiswa. Mereka juga meminta Gibran mengambil langkah yang dianggap

terhormat demi menjaga marwah lembaga kepresidenan.

Desakan tersebut mencuat setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada awal Oktober 2026.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Arsul Sani, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat.

NASIONAL

Indonesia Pangkas Ekspor Gas, Singapura: Dampaknya Tak Signifikan, Kurang dari 2%

Oleh Redaksi · 25 Okt, 22.51 WIB

BANDA ACEH - Otoritas Pasar Energi Singapura (Energy Market Authority/EMA) menyatakan pengurangan pasokan gas alam dari Indonesia hanya berdampak kurang dari 2 persen terhadap kebutuhan harian negara tersebut.

Singapura menyebut masih memiliki sejumlah alternatif untuk menjaga pasokan energi di tengah kebijakan pemangkasan ekspor gas Indonesia.

Pengurangan pasokan itu mulai berlaku pada Sabtu (24/10/2026). Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto sebelumnya mengumumkan pengurangan ekspor sebesar 31 miliar British thermal unit per hari (BBTUD).

Rinciannya, pasokan gas dari Natuna dikurangi 15 BBTUD, sedangkan dari Sumatera sebesar 16 BBTUD.

Namun, berdasarkan informasi dari importir gas di Singapura, EMA menyebut pengurangan pasokan yang tercatat mencapai 17 BBTUD selama 18 hari.

Angka tersebut tergolong kecil dibandingkan kebutuhan gas harian Singapura yang mencapai lebih dari 1.000 BBTUD.

"EMA memahami bahwa importir kami akan menempuh semua langkah yang tersedia dalam kontrak mereka terkait gangguan pasokan gas ini," ujar juru bicara EMA, dikutip dari The Straits Times, Minggu (25/10/2026).

EMA juga menyatakan telah menyiapkan rencana kontingensi untuk menghadapi kemungkinan gangguan pasokan gas.

EMA menjelaskan, Singapura sebelumnya pernah menghadapi pengurangan pasokan gas sebesar 20 BBTUD hingga 100 BBTUD dalam beberapa bulan terakhir.

Gangguan tersebut disebabkan oleh kegiatan pemeliharaan terencana maupun mendesak.

Pada periode tersebut, kekurangan pasokan berhasil diatasi dengan memanfaatkan sumber gas lainnya.

EMA menegaskan Singapura memiliki pasokan energi yang

cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Gas alam sendiri menyumbang sekitar 95 persen dari kebutuhan listrik Singapura. Selama ini, negara tersebut memperoleh gas melalui jaringan pipa dari Indonesia dan Malaysia, serta mengimpor gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) dari berbagai negara.

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber tertentu, Singapura juga berupaya memperluas pilihan pasokan energi. Langkah tersebut mencakup pemasangan panel surya serta penelitian teknologi energi baru, termasuk nuklir dan panas bumi.

Juru bicara EMA menyebut Singapore GasCo, perusahaan utama yang menangani pengadaan dan penyaluran gas alam di Singapura, siap meningkatkan impor apabila dibutuhkan.

Selain itu, perusahaan pembangkit listrik di Singapura diwajibkan mempertahankan cadangan bahan bakar yang mencukupi, termasuk solar, untuk memastikan pembangkitan listrik tetap berjalan.

NASIONAL

Heboh Kabar Saiful Mujani dan Dino Patti Djalal Temui Dubes, Singapura Buka Suara

Oleh Redaksi · 25 Okt, 20.24 WIB



BANDA ACEH - Kedutaan Besar Singapura di Jakarta membantah kabar yang menyebut Profesor Saiful Mujani dan Dino Patti Djalal mengunjungi kediaman Duta Besar Singapura untuk Indonesia pada 18 Oktober 2026. Kedutaan menyatakan informasi yang beredar di media sosial tersebut merupakan disinformasi.

Bantahan itu disampaikan melalui pernyataan resmi Kedutaan Besar Singapura di Jakarta, Minggu (25/10/2026), sebagai respons atas unggahan media sosial yang menarasikan adanya kunjungan kedua tokoh tersebut ke kediaman dubes.

"Kedutaan mengetahui adanya unggahan di media sosial yang memuat pernyataan palsu yang mengklaim bahwa Profesor Saiful Mujani dan Dr Dino Patti ...

NASIONAL

Rugi BUMN Belum Tentu Korupsi, Pemerintah Sebut Harus Dilihat Niatnya!

Oleh Redaksi · 26 Okt, 21.08 WIB



BANDA ACEH - Perusahaan pelat merah merugi belum tentu berarti pengurusnya melakukan korupsi. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengingatkan perlunya membedakan kerugian akibat risiko bisnis dengan kerugian yang muncul dari tindakan jahat. Persoalan inilah yang kini ikut menjadi perhatian pemerintah di tengah polemik usulan perubahan ketentuan kerugian negara dalam perkara korupsi.

Supratman mengatakan, keputusan bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah melalui perhitungan matang, mitigasi risiko, dan prinsip kehati-hatian tidak bisa begitu saja disamakan dengan tindakan yang sengaja dirancang untuk merugikan negara.

Menurutnya, proses pengambilan keputusan menjadi salah satu aspek penting untuk melihat apakah kerugian perusahaan merupakan konsekuensi bisnis atau terdapat unsur kesengajaan melakukan pelanggaran hukum.

"Saya hanya memberi perspektif saya, bahwa memang harus dibedakan mana tindakan korporasi yang dalam aksi korporasinya itu sudah memperhitungkan segala hal dan prudent, itu tentu berbeda dengan mereka yang punya niat dari awal, karena itu bisa dilihat dari proses pengambilan keputusannya," kata Supratman di Jakarta, Senin (26/10/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Supratman ketika menanggapi usulan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) pimpinan Luhut Binsar Pandjaitan mengenai peninjauan kembali ketentuan kerugian

negara dalam tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan keputusan bisnis korporasi negara.

Supratman menilai persoalan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh. Sebab, kerugian dalam kegiatan usaha tidak selalu muncul akibat penyalahgunaan kewenangan. Ada pula risiko komersial yang tetap dapat terjadi meskipun pengurus perusahaan telah menjalankan prinsip kehati-hatian.

Sebaliknya, keputusan yang sejak awal diambil dengan niat melanggar hukum tentu memiliki persoalan berbeda. Unsur niat jahat atau mens rea menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam menilai pertanggungjawaban pidana.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan pembaruan aturan tidak mencampurkan risiko bisnis yang wajar dengan tindakan yang memang mengandung unsur tindak pidana.

Usulan Luhut Masih Dikaji

Meski demikian, Supratman memastikan pemerintah belum mengambil keputusan mengenai perubahan ketentuan kerugian negara dalam perkara korupsi.

Usulan DEN, kata dia, masih berada pada tahap pembahasan awal. Bahkan, pemerintah belum sampai pada pembicaraan konkret mengenai revisi undang-undang.

"Itu kan baru usulan, belum ada sampai hari ini, itu masih didiskusikan. Karena kalau kita mau bicara yang pasti-pastikan berarti harus mengubah undang-undang," ujarnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Dino Patti Djalal Endus Tim Siluman Mulai Bergerak

Oleh Redaksi · 25 Okt, 20.12 WIB

BANDA ACEH -Dino Patti Djalal menduga ada pola terorganisasi di balik penyebaran kabar fiktif yang mengaitkan dirinya dan analis Politik Saiful Mujani dengan pertemuan bersama Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Kwok Fook Seng.

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri ini menilai penyebaran kabar melalui sejumlah akun media sosial tidak bisa serta-merta

dianggap sebagai tindakan iseng. Ia mencurigai adanya tim yang bekerja secara terkoordinasi untuk membentuk persepsi tertentu di tengah masyarakat.

"Ini mencerminkan adanya satu modus operandi yang baru, yaitu suatu teknik di mana suatu tim yang tidak diketahui wujudnya, anggotanya, saya katakan tim siluman, mereka membuat berita-berita yang fiktif, posting di ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Laporan Dugaan Penipuan Kripto Timothy Ronald Disetop, Polisi Sebut Tak Ditemukan Pidana

Oleh Redaksi · 26 Okt, 19.14 WIB



BANDA ACEH - Kasus dugaan penipuan investasi kripto yang sempat menyeret nama pendiri Akademi Crypto, Timothy Ronald, berujung pada penghentian dua laporan polisi. Polda Metro Jaya memastikan penyelidikan atas kedua laporan tersebut telah disetop setelah penyidik melakukan gelar perkara. Namun, alasan penghentiannya berbeda, sementara salah satu pelapor masih meminta perkara itu diperiksa kembali.

Kepastian tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Senin (26/10/2026). Menurutny, dua laporan yang ditangani Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Metro Jaya telah melalui serangkaian pemeriksaan sebelum diputuskan untuk dihentikan.

Laporan pertama tercatat dengan nomor

LP/B/227/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertanggal 9 Januari 2026, dengan pelapor berinisial Y. Perkara ini ditangani Subdit I Ditressiber Polda Metro Jaya.

Penyelidik menghentikan penanganan laporan tersebut pada 14 September 2026 setelah gelar perkara menyimpulkan tidak ditemukan peristiwa pidana sebagaimana yang dilaporkan.

"Terhadap laporan yang ditangani Subdit I, penyelidikan telah dihentikan pada 14 September 2026 berdasarkan hasil gelar perkara yang menyimpulkan bahwa tidak ditemukan peristiwa pidana dalam perkara yang dilaporkan," kata Budi.

Nasib serupa dialami laporan kedua yang diajukan pelapor berinisial RR pada 19 Januari 2026. Laporan bernomor LP/B/483/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA itu ditangani

Subdit IV Ditressiber Polda Metro Jaya.

Dalam perkara kedua, polisi telah meminta klarifikasi dari pelapor, sejumlah saksi, pihak terlapor, serta ahli dan instansi terkait.

Hasil gelar perkara pada 15 September 2026 menyimpulkan bukti yang tersedia belum cukup untuk menghubungkan perbuatan pihak yang dilaporkan dengan tindak pidana yang dipersangkakan.

"Berdasarkan hasil gelar perkara pada 15 September 2026, disepakati penghentian penyelidikan karena belum ditemukan bukti yang cukup untuk menghubungkan perbuatan pihak yang dilaporkan dengan tindak pidana yang dipersangkakan. Selanjutnya, Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan telah diterbitkan pada 28 September 2026," jelas Budi.

Pelapor Belum Menyerah

Meski kedua penyelidikan telah dihentikan, persoalan belum sepe-nuhnya selesai. Kuasa hukum pelapor dalam perkara yang ditangani Subdit IV meminta polisi menggelar perkara khusus untuk meninjau kembali penanganan laporan tersebut.

Polda Metro Jaya menyatakan permintaan itu akan ditindaklanjuti. Polisi juga membuka kesempatan bagi pelapor untuk menyerahkan bukti baru apabila masih memiliki informasi yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana.

"Adapun terhadap laporan yang ditangani Subdit IV, direncanakan pelaksanaan gelar perkara khusus atas permohonan kuasa hukum pelapor.

NASIONAL

Geisz Khalifa Sindir Gibran: Sekatro-katronya Elu Waktu Sekolah, Pasti Ada yang Ingat!

Oleh Redaksi · 26 Okt, 19.06 WIB



BANDA ACEH - Loyalis Anies Baswedan, Geisz Khalifa, melayangkan sindiran tajam terkait kontroversi ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kini bergulir hingga Mahkamah Konstitusi (MK) dan usulan Hak Angket di DPR.

Geisz menilai pertanyaan mengenai riwayat pendidikan tingkat menengah seharusnya menjadi hal yang sederhana dan mudah dibuktikan tanpa perlu memicu perdebatan berskala nasional.

Geisz membandingkan pengalamannya saat ditanya mengenai latar belakang pendidikannya sendiri. Ia menegaskan bahwa seseorang yang benar-benar menempuh pendidikan pasti memiliki rekam jejak, dokumen, serta rekan seangkatan yang dapat mengonfirmasi keberadaannya.

"Gue kalau ditanya, 'SMA lu di mana?' Gue jawab: SMA Negeri 7 Jakarta. Kartu OSIS masih ada. Foto zaman muda juga ada," ujar Geisz.

Ia juga menyinggung rekam jejak pendidikan Anies Baswedan sebagai contoh figur publik yang memiliki riwayat sekolah yang teratur dan dapat diverifikasi dengan mudah.

"Gue jadi ingat Anies Baswedan. Alumni SMA 2 Yogyakarta, pernah jadi Ketua OSIS se-Indonesia. Riwayat masa sekolahnya punya cerita yang bisa ditelusuri. Orang kalau punya riwayat yang jelas, ditanya sekolah di

mana, ya tinggal jawab. Nggak perlu bikin satu republik ikut mikir," tegasnya.

Menurut Geisz, polemik ijazah ini telah menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu di tingkat lembaga negara. Ia menilai persoalan bukti kelulusan, baik lulusan dalam negeri maupun luar negeri, merupakan hal mendasar yang memiliki standar verifikasi yang jelas.

"Belum lagi teman-teman satu angkatan. Sekatro-katronya elu waktu sekolah, pasti ada saja yang masih ingat. Kecuali kalau sekolah lu cuma sampai warung, itu lain cerita!," tambahnya.

"Urusan ijazah SMA Gibran kok bisa sampai ke MK? DPR pun mulai bicara hak angket. Gile, pertanyaan 'SMA lu di mana?' sekarang levelnya sudah nasional!" kata Geisz.

Ia menambahkan bahwa kelulusan dari lembaga pendidikan mana pun pasti meninggalkan bukti fisik dan ingatan dari teman-teman seangkatan.

"Mau sekolah di luar negeri atau di dalam negeri, sama saja. Ijazah ya ijazah. Nama sekolah boleh beda, sistem pendidikan boleh beda, tapi kelulusan pasti punya dasar dan bukti yang bisa diperiksa. Tapi kalau sampai MK bersidang dan DPR mau bikin hak angket, itu bukan reuni tapi lu nipu yang bikin satu negeri jadi ribet," pungkasnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Tak Hadir Rakornas TPAKD, Muslim Arbi: KDM Mulai Membelot dan Melawan Prabowo

Oleh Redaksi · 25 Okt, 21.57 WIB

BANDA ACEH - Ketidakhadiran Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan Politik. Pengamat Politik dan hukum Muslim Arbi menilai, absennya Dedi berpotensi memunculkan pertanyaan mengenai loyalitas politiknya kepada Prabowo dan Partai Gerindra.

Muslim menduga, Dedi mulai menunjukkan sikap politik yang lebih mandiri seiring meningkatnya popularitas dan munculnya

namanya dalam bursa calon presiden 2029.

"KDM mulai membelot dan melawan Prabowo. Dia merasa percaya diri dengan hasil berbagai survei yang menempatkan dirinya di atas Prabowo. Ini bisa menjadi modal politik bagi KDM untuk membangun ambisi yang lebih besar pada Pilpres 2029," kata Muslim Arbi dalam keterangannya, Ahad (25/10/2026).

Menurut Muslim, ketidakhadiran Dedi dalam acara nasional yang dihadiri Presiden Prabowo layak menjadi bahan evaluasi politik. Terlebih, Dedi merupakan

kader Gerindra yang sebelumnya menyatakan dukungan untuk memenangkan Prabowo pada Pemilu 2024.

"Kalau seorang kader partai yang juga menjabat gubernur tidak hadir dalam agenda yang dihadiri presiden, tentu publik bisa bertanya. Apakah ini murni persoalan pekerjaan pemerintahan atau ada dinamika politik yang lebih besar? Ini perlu dicermati," ujarnya.

Muslim mengaitkan dugaan meningkatnya kepercayaan diri Dedi dengan hasil survei elektabilitas calon presiden 2029 yang

dirilis Tempo Data Science pada Agustus 2026.

Berdasarkan survei yang dilakukan pada 31 Juli hingga 11 Agustus 2026 terhadap 1.260 responden di 38 provinsi, Dedi Mulyadi memperoleh elektabilitas 41 persen dalam simulasi pemilihan presiden, sedangkan Prabowo Subianto memperoleh 15 persen. Anies Baswedan berada di posisi berikutnya dengan 10 persen.

Survei tersebut menggunakan metode multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 2,9 persen.

NASIONAL

‘Rocky Gerung Jadi Duta Penguasa ke Kampus, Mahasiswa Terancam Jadi Ternak Politik Kekuasaan’

Oleh Redaksi · 25 Okt, 21.58 WIB

BANDA ACEH - Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto melontarkan kritik terhadap Rocky Gerung yang dinilainya kini menjadi duta penguasa ke kampus-kampus. Gigin menilai kehadiran Rocky di lingkungan perguruan tinggi berpotensi menjadi sarana untuk memengaruhi cara berpikir mahasiswa demi kepentingan Politik kekuasaan, Ahad (25/10/2026).

Gigin bahkan menggunakan istilah keras dengan menyebut mahasiswa berpotensi dijadikan "ternak politik kekuasaan" melalui proses yang ia gambarkan sebagai pencucian otak.

Pernyataan tersebut menyoroti persoalan independensi kampus sebagai ruang intelektual yang

semestinya terbuka bagi pertukaran gagasan, perdebatan kritis, dan kebebasan akademik.

Menurut kritik Gigin, kampus tidak seharusnya menjadi tempat untuk membentuk mahasiswa agar mengikuti kepentingan politik pihak tertentu. Perguruan tinggi justru diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang berani menguji kebijakan pemerintah, mempertanyakan kekuasaan, serta menyampaikan kritik berdasarkan argumentasi dan data.

Kehadiran tokoh publik di kampus, termasuk mereka yang memiliki pandangan politik tertentu, memang dapat menjadi bagian dari dinamika diskusi akademik.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Kubu Febrie Singgung Gugatan Ijazah Gibran di MK usai Sidang Putusan Sela, Ada Apa?

Oleh Redaksi · 26 Okt, 17.31 WIB



BANDA ACEH - Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampid-sus) Febrie Adriansyah, Patra M Zen, menegaskan majelis hakim belum menolak maupun menga-bulkan perlawanan kliennya dalam kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Menurut Patra, majelis hakim akan mempertimbangkan perlawanan tersebut bersama putu-san akhir perkara.

Dengan demikian, kata dia, penilaian terhadap aspek formil dan materiil perlawanan belum diputus secara terpisah. Dia mengatakan situasi tersebut serupa dengan persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terkait ijazah Wakil Presiden

Gibran Rakabuming Raka di Mah-kamah Konstitusi (MK), yang tidak mengeluarkan putusan sela dalam perkara tersebut.

"Ini seperti MK yang kemarin, diperiksa bisa saja, ternyata secara formil cacat. Jadi sekali lagi kami mau sampaikan, dalam putusan sela pagi ini majelis hakim tidak menyatakan menolak perlawanan kami," kata Patra kepada warta-wan, Senin (26/10/2026).

Dia menjelaskan, majelis hakim tetap akan menilai aspek formil dan materiil meskipun pemerik-saan perkara berlanjut ke tahap pembuktian. Patra pun mengapre-siasi sikap majelis hakim yang dinilainya tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan.

"Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyata-kan bahwa perlawanan kami dan juga Pak Febrie selain dari pem-buktian tetapi menyangkut juga formil dan materiil," lanjut Patra.

Patra menambahkan, tim kuasa hukum telah siap menghadapi tahap pembuktian. Pihaknya akan menyampaikan pembelaan secara terperinci untuk menunjukkan bahwa dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) sulit dibuktikan.

"Terkait dengan mestinya diper-timbangkan dalam pokok perkara, kami mau sampaikan tim kuasa hukum sudah siap melakukan pembelaan dan di dalam pembuk-tian kita akan secara rinci menun-jukan bahwa dakwaan yang diaju-

kan oleh penuntut umum akan sulit dibuktikan," tutup dia.

Diketahui, Febrie didakwa melakukan pemerasan dan TPPU. Dalam dakwaan pemerasan, Febrie diduga memeras pengusaha Tan Kian terkait penanganan per-kara dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Nilai pemerasan yang didakwa-kan mencapai 5 juta dolar Singa-pura atau setara

Sementara dalam perkara TPPU, Febrie diduga melakukan pencucian uang dengan nilai lebih dari Rp350 miliar. Nilai tersebut belum termasuk aset berupa tanah dan/atau bangunan yang diduga diterimanya

NASIONAL

Ade Armando sebut Rocky Gerung Tak Punya Ijazah S1 yang Berakibat...

Oleh Redaksi · 26 Okt, 19.09 WIB



BANDA ACEH - Mantan dosen Universitas Indonesia (UI), Ade Armando, buka suara mengenai sosok anggota Dewan Pertimba-ngan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung.

Ade yang kini menjadi loyalis keluarga mantan presiden Jokowi dan Wapres Gibran itu mengakui bahwa Rocky merupakan figur yang cerdas dan memiliki wawa-san luas melebihi rata-rata penga-jar akademis, meski terkendala status administratif ijazah.

Menurut Ade, kecerdasan Rocky diperoleh dari kebiasaa-nya membaca buku serta aktif dalam berbagai forum diskusi. Hal inilah yang membuat banyak dosen dan akademisi menaruh rasa hormat kepadanya.

"Orang ini kan pintar ya, dan banyak dosen yang memandang dia memang lebih pintar dari dosen. Karena dia baca buku, dia diskusi, saya akui dia pintar," ujar Ade dalam sebuah podcast dikutip Senin (26/10).

Mengenai status pendidikan Rocky, Ade menduga bahwa Rocky sebenarnya telah menyele-saikan perkuliahan S1, namun enggan menyelesaikan revisi tugas akhirnya. Hal itu membuatnya tidak pernah menerima ijazah secara formal.

"Dia mungkin sebenarnya lulus S1, tapi begitu dinyatakan harus

direvisi, dugaan saya dia malas. Akibatnya dia tidak mendapat ijazah S1," lanjutnya.

Meski tidak memegang ijazah formal, reputasi keilmuan Rocky membuatnya tetap dipercaya mengajar di kampus selama bertahun-tahun. Lingkungan aka-demis UI, di luar bagian adminis-trasi menganggap Rocky sudah menyelesaikan studinya.

Selama berkiprah di kampus, Rocky tidak hanya mengajar di kelas, tetapi juga membantu mahasiswa dalam penyusunan tesis hingga disertasi.

Salah satu momen yang cukup dikenal publik adalah saat ia men-jadi pembimbing skripsi aktris Dian Sastrowardoyo.

Namun, karier Rocky di civitas akademika UI akhirnya berhenti setelah pihak kampus melakukan penataan dan evaluasi berkas administrasi dosen.

Dalam proses pemeriksaan ter-sebut, nama Rocky tidak terdaftar secara resmi karena tidak adanya bukti penyelesaian skripsi.

Ade menilai sifat Rocky yang tidak patuh pada aturan adminis-tratif menjadi penyebab utama status kepegawaiannya bermasa-lah.

"Dia itu sebetulnya adalah orang yang memang dari dulu rada serampangan," pungkas Ade.

ADVERTORIAL

Selamat dan Sukses

ATAS PELANTIKAN DAN SERTIJAB

BRIGJEN TNI MAHESA FITRIADI, S.A.P., M.M.

Sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda

Oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat
JENDERAL TNI TANDYO BUDI REVITA

di Gedung AH Nasution,
Markas Besar TNI Angkatan Darat,
Jakarta Pusat,
pada hari Jumat, 16 Oktober 2026

Semoga dalam melaksanakan tugas
selalu mendapat rahmat dan petunjuk
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dan Terima Kasih Kepada
MAYJEN TNI JOKO HADI SUSILO, S.I.P.
Atas pengabdianya selama ini

Tertanda,
FADHIL ILYAS
Direktur Utama

www.bankaceh.co.id

Bank Aceh Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS

NASIONAL

Pemakzulan Gibran Harus Lewat Jalur Konstitusi, Bukan cuma Tekanan Politik

Oleh Redaksi · 26 Okt, 17.21 WIB



BANDA ACEH -Perjuangan Politik untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak cukup hanya mengandalkan desakan publik kepada pimpinan DPR. Dukungan fraksi-fraksi partai politik di parlemen menjadi faktor penting untuk membuka jalan bagi proses konstitusional tersebut.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengatakan, DPR dijadwalkan kembali memasuki masa persidangan pada 9 November 2026 setelah masa reses. Menurutnya, momentum tersebut perlu diperhatikan oleh kelompok mantan Wamenkumham Denny Indrayana maupun kekuatan politik yang menginginkan pemakzulan Gibran.

Amir menilai pimpinan DPR tidak bisa mengambil keputusan sendiri tanpa dukungan politik dari fraksi-fraksi partai. Karena

itu, komunikasi dengan partai politik dan Fraksi di DPR dinilai lebih strategis dibandingkan hanya menyampaikan tuntutan kepada pimpinan parlemen.

"Sesuai realitas yang ada, kelompok yang menginginkan pemakzulan Gibran harus membangun komunikasi dengan fraksi-fraksi partai politik," kata Amir, dikutip Senin 26 Oktober 2026.

Menurut Amir, PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) perlu menjadi perhatian pihak-pihak yang sedang memperjuangkan pemakzulan Gibran. Ia menyebut komunikasi dengan kedua partai tersebut sudah dilakukan dan perlu ditindaklanjuti melalui langkah politik yang terukur.

"Kalau memang ingin memperjuangkan pemakzulan Gibran, temui fraksi PDIP dan PKS. Bangun komunikasi politik dengan

mereka. Jangan hanya berharap pimpinan DPR mengambil keputusan tanpa dukungan dari kekuatan politik di parlemen," kata Amir.

Amir menekankan bahwa langkah tersebut harus tetap berlandaskan konstitusi. Menurut dia, perjuangan pemakzulan tidak boleh berhenti pada tekanan politik, tetapi harus diarahkan pada prosedur ketatanegaraan yang berlaku.

Selain wacana pemakzulan, Amir menyoroti kemungkinan penggunaan Hak Angket DPR. Hak tersebut merupakan instrumen pengawasan parlemen yang dapat digunakan untuk menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas.

Ia menilai, apabila hak angket benar-benar bergulir dan memenuhi persyaratan, proses tersebut

berpotensi membawa persoalan politik ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk kemungkinan pemanggilan Presiden Prabowo Subianto dalam proses penyelidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kalau hak angket berjalan, Prabowo bisa dipanggil dewan. Ini yang harus diantisipasi Gerindra," kata Amir.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dinamika politik mengenai Gibran berpotensi beriris dengan hubungan antara DPR dan pemerintah. Bagi Partai Gerindra, perkembangan semacam itu perlu diperhitungkan karena proses pengawasan parlemen dapat memunculkan pertanyaan mengenai kebijakan maupun keputusan pemerintah.

[» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id](http://www.harianaceh.co.id)

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

150 Guru Besar Desak Gibran Mundur, Ini Tanggapan Relawan Jokowi-Prabowo-Gibran

Oleh Redaksi · 25 Okt, 20.16 WIB

BANDA ACEH - Perwakilan Koalisi Relawan Jokowi-Prabowo-Gibran, David Pajung, menanggapi desakan 150 guru besar dari berbagai daerah agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur secara sukarela. David menilai desakan tersebut tidak memiliki landasan hukum yang kuat karena Gibran terpilih melalui Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

David menyebut Gibran memperoleh dukungan sekitar 58 persen suara atau lebih dari 90 juta pemilih bersama Presiden Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Menurutnya, hasil pemilihan langsung tersebut harus dihormati.

"Wakil Presiden ini terpilih secara sah, didukung oleh mayoritas rakyat Indonesia, yaitu 58 persen pemilih di Pilpres 2024 atau sekitar 90 juta lebih jiwa rakyat Indonesia yang memilih," ujar David Pajung, Minggu (25/10/2026).

Dia juga membandingkan jumlah pemilih dalam Pilpres 2024 dengan anggota forum guru besar yang menyampaikan desakan tersebut. David menilai jumlah anggota forum tidak sebanding dengan suara pemilih yang menentukan pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

"Nah, kalau forum guru besar ini, forum yang dibentuk ini itu hanya beranggotakan seratusan

orang, itu enggak bisa, enggak sebanding dengan 90 juta orang lebih yang mencoblos Prabowo dan Gibran sebagai pimpinan bangsa ini," katanya.

David menegaskan, desakan agar Wapres mundur harus mengacu pada mekanisme konstitusional. Dia merujuk Pasal 7 hingga Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amendemen keempat.

"Kalau para profesor ini baca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasca-amandemen keempat, di Pasal 7 hingga 7B, sama sekali tidak ada ruang masuk bagi forum mana pun untuk meminta presiden atau

wakil presiden mundur tanpa dasar hukum yang jelas," ucapnya.

Sebelumnya, DPP PDIP menerima surat terbuka dari Forum Guru Besar Indonesia yang mendesak Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden. Forum tersebut juga berharap Presiden Prabowo Subianto dan partai Politik di parlemen mendengarkan tuntutan mereka.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan hal tersebut saat berada di Sekolah Rakyat PDIP, Jakarta Selatan, Rabu 21 Oktober 2026.

[» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id](http://www.harianaceh.co.id)

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Jimly Puji Presiden Brasil Cuma Tamat SD, Netizen Jawab Menohok: Dia Gak Punya Paman di MK

Oleh Redaksi · 26 Okt, 18.30 WIB



BANDA ACEH - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie memuji keberhasilan Luiz Inácio Lula da Silva yang kembali terpilih sebagai Presiden Brasil untuk keempat kalinya pada Minggu (25/10/2026). Lula, yang berusia 81 tahun, memenangi putaran kedua dengan 51,79% suara mengalahkan Flávio Bolsonaro (48,21%), meski sebelumnya tertinggal di putaran pertama.

Melalui akun X @JimlyAs, Jimly menulis bahwa pencapaian itu "hebat" karena Lula hanya tamat SD dan mengikuti kursus keterampilan. Ia merujuk Pasal 14 ayat (4) UUD Brasil yang mensyaratkan kandidat terdaftar sebagai pemilih dan tidak buta huruf, tanpa syarat pendidikan formal tinggi.

"Hebat, Presiden Brazil Lula da Silva kmbali trpilih jadi Presiden ke4 kalinya. Pdhal cuma tamat SD & kursus ktrampilan. Karena di Pasal 14 ayat (4) UUD Brazil, smua kandidat pemilu baik parlemen maupun pres/wapres hrs trdaftar sbg pemilih & tdk buta huruf", cuitnya.

Pujian ini memicu reaksi netizen yang membandingkan perjalanan Lula dengan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Banyak yang menyebut Lula "bukan anak karbitan" seperti Gibran, yang dinilai naik cepat berkat dinasti Politik dan duku-

ngan ayahnya, mantan Presiden Joko Widodo. Istilah "anak karbitan" merujuk pada seseorang yang dipercepat naik tanpa proses alami, mirip buah yang dimatangkan dengan karbit.

Perjalanan Panjang Lula: Dari Kemiskinan hingga Istana Presiden

Lula lahir 27 Oktober 1945 di Garanhuns, Pernambuco, dari keluarga petani miskin. Ia anak ketujuh dari delapan bersaudara; orang tuanya buta huruf. Sejak kecil ia bekerja sebagai penyemir sepatu, penjual kacang, dan pembantu di pabrik pewarna. Ia baru belajar membaca di usia sekitar 10 tahun dan putus sekolah setelah pendidikan dasar (setara SD/awal SMP) untuk membantu keluarga.

Di usia 14 tahun, Lula pindah ke São Paulo dan bekerja di pabrik sekrup sambil mengikuti kursus tiga tahun di Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) sebagai torneiro mecânico (operator mesin bubut). Ia kehilangan jari kelingking tangan kiri akibat kecelakaan kerja di pabrik. Pengalamannya sebagai buruh logam membawanya aktif di serikat pekerja, menjadi ketua serikat metalurgi São Bernardo do Campo pada 1975, dan memimpin mogok besar era kediktatoran militer. Ia ikut mendirikan Partai Buruh (PT) pada 1980.

[» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id](http://www.harianaceh.co.id)

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

KDM Dikabarkan Bakal Masuk PSI dan Duet dengan Gibran pada Pilpres 2029 Mendatang

Oleh Redaksi · 25 Okt, 13.54 WIB

BANDA ACEH - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM dikabarkan akan bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Rencana gabungannya KDM akan diumumkan bertepatan dengan rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo deklarasi menjadi ketua umum partai berlambang Gajah, pada awal November mendatang.

Terkait adanya kabar gabungannya KDM ke partainya, Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron membantahnya. Begitu juga soal rencana KDM akan diaduetkan dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk Pilpres 2029 mendatang.

"Kabar burung saja. Tidak pernah ada pertemuan dengan pimpinan PSI bahkan dibicarakan internal. KDM sudah berada di partai besar, partai pemenang dan sudah cocok disana," tukasnya.

Bro Ron menyebut, partainya masih setia untuk mendukung Gibran dengan Prabowo selaku Ketua Partai Gerindra.

"Untuk saat ini belum berubah, dukung Prabowo-Gibran sampai selesai," tukasnya.

Sementara itu, terkait kabar Jokowi yang akan mendeklarasikan diri menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bro Ron mengatakan, terdapat permintaan dari sejumlah kader di daerah ...

[» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id](http://www.harianaceh.co.id)

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Ketua DPRD Sultra Dipecat Dari Partai NasDem

Oleh Redaksi · 26 Okt, 14.00 WIB



Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sultra), La Ode Tariaia. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Keputusan DPP Partai NasDem memberhentikan La Ode Tariaia dari keanggotaan partai kini berlanjut ke proses pergantian antarwaktu (PAW).

DPW NasDem Sulawesi Tenggara (Sultra) mendatangi Kantor DPRD Sultra, Senin (26/10/2026), untuk menyerahkan surat pemecatan sekaligus mendorong agar tahapan pergantian segera diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.

Juru Bicara DPW NasDem Sultra, Muttaqin Siddiq, mengatakan penyerahan surat tersebut merupakan tindak lanjut atas keputusan DPP NasDem yang memberhentikan La Ode Tariaia sebagai kader partai.

"Kami mendatangi Kantor DPRD Sultra untuk menyerahkan surat pemecatan saudara La Ode

Tariaia. Jadi, secara otomatis, semua hak dan kewenangan yang melekat pada Tariaia berhenti karena dia sudah dipecat dari keanggotaan partai," kata Muttaqin, Senin (26/10/2026)

Langkah tersebut menandai dimulainya tahapan administratif yang perlu ditindaklanjuti oleh lembaga terkait. NasDem meminta proses PAW tidak berlarut-larut, tetapi tetap berjalan melalui mekanisme yang sah dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Muttaqin menegaskan, proses PAW harus mengikuti prosedur yang berlaku, termasuk penyampaian surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut dia, terdapat batas waktu tujuh hari untuk meneruskan surat terkait proses PAW ke

KPU. Setelah surat diterima, KPU memiliki waktu lima hari untuk memproses dokumen yang diperlukan sebelum mengembalikannya kepada DPRD.

"Kalau kami, prosesnya harus sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku dalam perundang-undangan. Ada jangka waktu tujuh hari yang diatur undang-undang untuk surat itu diteruskan ke KPU. Di KPU juga ada batas waktu lima hari," jelasnya.

Ketentuan waktu tersebut menjadi salah satu hal yang disoroti NasDem agar tahapan administrasi berjalan sesuai jadwal. Namun, pelaksanaan PAW tetap bergantung pada pemenuhan persyaratan dan prosedur hukum yang berlaku.

DPW NasDem Sultra berharap seluruh tahapan administrasi

segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Penyerahan surat pemecatan menjadi langkah awal dalam proses yang selanjutnya melibatkan DPRD dan KPU.

Meski demikian, pemberhentian dari keanggotaan partai dan proses pergantian jabatan di lembaga legislatif merupakan tahapan yang harus dibedakan. Pelaksanaan PAW, termasuk proses yang berkaitan dengan pergantian Ketua DPRD Sultra, tetap harus mengikuti mekanisme hukum dan administrasi yang berlaku.

Karena itu, tindak lanjut DPRD dan KPU menjadi bagian penting untuk memastikan proses pergantian berjalan sesuai ketentuan, bukan semata-mata berdasarkan keputusan internal partai.

NASIONAL

KPK Usul Harta Pejabat Tak Masuk LHKPN Dirampas Negara

Oleh Redaksi · 26 Okt, 19.10 WIB



BANDA ACEH - Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana (RUU Perampasan Aset) diusulkan mengatur negara dapat merampas aset penyelenggara negara yang tidak tercantum LHKPN.

Usulan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak, pada Minggu 25 Oktober 2026.

"Seseorang yang melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), dan ternyata kekayaan yang sesungguhnya melampaui batas yang dilaporkan di LHKPN, maka harta itu berhak dirampas," kata Tanak.

Tanak juga mengusulkan agar negara merampas harta kekayaan penyelenggara negara yang tidak melaporkan LHKPN.

"Pejabat wajib melaporkan LHKPN, tetapi tidak melapor, maka harta kekayaannya dirampas saja oleh negara berdasarkan UU Perampasan aset," ucapnya.

Dengan adanya ketentuan tersebut, diharapkan setiap penyelenggara tertib dan jujur dalam melaporkan LHKPN kepada KPK.

"Kalau hal seperti ini diatur di dalam UU Perampasan Aset, semua penyelenggara negara tidak akan berani membuat laporan LHKPN yang tidak benar. Pasti mereka melapor LHKPN dengan benar," ujarnya.

Di sisi lain, dia mengusulkan agar nomenklatur RUU Perampasan Aset tidak diubah.

"Memang lebih layak istilah atau nomenklatur perampasan daripada menggunakan nomenklatur yang lain, karena dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juga banyak menggunakan kata-kata atau nomenklatur perampasan," katanya.

Menurut dia, salah satunya adalah Pasal 18 pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor).

"Jadi, kata-kata atau nomenklatur perampasan itu bukan hal yang tabu, atau bukan hal yang tidak biasa. Itu hal biasa diatur dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ujarnya.

NASIONAL

Klarifikasi Lengkap Menkes Budi soal Tuduhan Pakai Tabung Oksigen gegara Tak Kuat Asap Karhutla

Oleh Redaksi · 25 Okt, 11.29 WIB

BANDA ACEH - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin akhirnya buka suara setelah fotonya menggunakan tabung oksigen saat berkunjung ke Kalimantan Tengah (Kalteng) viral di media sosial.

Foto tersebut ramai diperbincangkan karena disertai narasi yang menyebut Budi tidak kuat menghadapi asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla), meski belum 24 jam berada di wilayah tersebut.

Narasi yang beredar juga mengaitkan foto tersebut dengan pernyataan Budi yang meminta masyarakat beradaptasi dengan kondisi yang ada. Dia disebut mengalami sesak napas hingga harus menggunakan tabung oksigen.

Namun, Budi membantah narasi tersebut. Melalui akun Instagram pribadinya, dia menegaskan bahwa foto yang beredar memang benar, tetapi konteks yang disampaikan dalam unggahan tersebut tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya.

"Fotonya memang benar, namun narasi yang beredar itu tidak

benar. Saya sama sekali tidak merasa sesak pada saat itu, saya juga terbantu dengan menggunakan masker KN95 selama kunjungan berlangsung dan saya hanya bertujuan memberikan informasi dan edukasi menunjukkan fasilitas Rumah Oksigen seperti yang terekam di video ini," kata Budi dalam keterangan unggahannya, dikutip Minggu (25/10/2026).

Untuk menjelaskan kejadian sebenarnya, Budi turut membagikan video lengkap kunjungannya ke Kalteng. Dalam video itu, dia terlihat mendatangi Rumah Oksigen Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dan Bus Oksigen di Palangka Raya.

Saat berada di Rumah Oksigen MDMC, Budi terlihat duduk sambil menggunakan fasilitas oksigen. Dia mengaku mencoba langsung fasilitas tersebut untuk merasakan manfaatnya, bukan karena mengalami sesak napas seperti yang dituduhkan dalam narasi viral.

"Saya sendiri coba, jauh lebih enak seger saturasi oksigen saya naik," ujar Budi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

Oleh Redaksi · 25 Okt, 13.51 WIB

BANDA ACEH - - Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi, dikabarkan akan mendeklarasikan diri menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Berdasarkan informasi yang diperoleh JawaPos.com, deklarasi pergantian pucuk pimpinan parpol bergambar gajah tersebut, rencananya akan dilakukan pada awal November mendatang.

Dalam deklrasi tersebut, sejumlah tokoh-tokoh Politik lain seperti Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias Kang Dedi Mulyadi (KDM) dikabarkan akan bergabung dari Partai Gerindra ke PSI. Nantinya, setelah resmi bergabung, KDM rencananya akan disandingkan dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk berkontestasi pada Pilpres 2029 mendatang.

Dikonfirmasi terkait adanya rumor pergantian pucuk pimpinan partainya, Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ronald Aristone Sinaga alias Bro

Ron mengatakan, terdapat permintaan dari sejumlah kader di daerah yang mengusulkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi ketua umum.

Atas usulan itu, ia pun menyampaikan langsung saat dirinya berkunjung ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada Rabu (21/10).

"Waktu ke Solo, saya menyampaikan aspirasi beberapa pengurus daerah," kata Bro Ron dikonfirmasi JawaPos.com, Minggu (25/10).

Bro Ron menyatakan, PSI sangat terbuka terhadap usulan setiap kader. Karena itu, usulan tersebut masih menjadi pembahasan di tingkat internal.

"Sebagai partai super terbuka, tentunya kami membebaskan kader untuk bersuara dan kita tampung untuk saat ini," tegasnya.

Meski demikian, Bro Ron menegaskan usulan agar Jokowi menjadi ketua umum PSI tidak sepenuhnya dapat terwujud. Ia menegaskan, saat ini pihaknya

masih fokus untuk menyelesaikan struktur sampai tingkat desa dari Sabang sampai Merauke.

"Belum tentu terwujud. Tergantung situasi politik external dan internal. Untuk saat ini masih fokus menyelesaikan struktur sampai tingkat desa dari Sabang sampai Merauke," ungkapnya.

Di lain pihak ketika ditanya soal kabar gabungnya KDM ke partainya dan akan diduetkan dengan Gibran pada Pilpres 2029 mendatang, Bro Ron langsung membantahnya.

"Kabar burung saja. Tidak pernah ada pertemuan dengan pimpinan PSI bahkan dibicarakan internal. KDM sudah berada di partai besar, partai pemenang dan sudah cocok disana," tukasnya.

Bro Ron menyebut, partainya masih setia untuk mendukung Gibran dengan Prabowo selaku Ketua Partai Gerindra.

"Untuk saat ini belum berubah, dukung Prabowo-Gibran sampai selesai," pungkasnya

NASIONAL

Gagasan Luhut Hapus Kerugian Negara Berpotensi Jadi Karpet Merah Koruptor

Oleh Redaksi · 25 Okt, 13.43 WIB



BANDA ACEH -Simpul Aktivis Gerakan 98 (Siaga 98) melontarkan kritik keras terhadap gagasan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) terkait kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi (TPK). Gagasan tersebut dinilai tidak tepat dan berpotensi meruntuhkan fondasi keuangan serta perekonomian negara.

Koordinator Siaga 98, Hasanuddin mengatakan, bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia masih berkaitan erat dengan keuangan negara, baik dari sisi pendapatan maupun belanja negara. Karena itu, unsur kerugian keuangan negara dinilai tetap penting dalam upaya pemberantasan korupsi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Dua Kali Nusron Wahid Mangkir, MAKI Adukan Pimpinan KPK ke Dewas

Oleh Redaksi · 26 Okt, 13.55 WIB



BANDA ACEH - Ketidakhadiran Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid sebanyak dua kali dalam panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbuntut pengaduan etik. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengadukan seluruh pimpinan KPK kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK karena menilai lembaga antirasuah itu tidak tegas menyikapi ketidakhadiran saksi tersebut.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyampaikan pengaduan secara daring pada Minggu (25/10/2026). Ia menilai KPK semestinya mengambil langkah lebih tegas, termasuk menerbitkan surat perintah membawa terhadap Nusron Wahid.

Bagi Boyamin, persoalan ini bukan semata-mata soal ketid-

khadiran seorang saksi, melainkan juga menyangkut konsistensi penegakan hukum dan kewibawaan lembaga antirasuah dalam memastikan kepatuhan terhadap panggilan penyidik.

Laporan investigasi korupsi "Mestinya KPK tegas dengan cara jemput paksa terbitkan surat perintah membawa kepada Nusron Wahid," ujar Boyamin dikutip Senin (26/10/2026).

Boyamin menilai lambannya respons KPK terhadap saksi yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dapat menimbulkan pertanyaan mengenai ketegasan lembaga tersebut. Menurutnya, penanganan terhadap saksi yang mangkir semestinya dilakukan secara profesional dan konsisten sesuai ketentuan hukum.

Boyamin menyebut persoalan ketidaktegasan KPK tidak hanya

terjadi dalam pemeriksaan Nusron Wahid. Ia juga menyinggung belum berhasilnya KPK menghadirkan saksi lain, yakni Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Muryanto Amin dalam kasus proyek jalan di Sumatera Utara, serta Witjaksono dalam perkara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Menurut Boyamin, rangkaian kejadian tersebut dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap keseriusan KPK dalam menghadapi saksi yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.

"Dengan abai, jiper, dan lemotnya KPK atas mangkirnya panggilan saksi-saksi maka menjadikan wibawa hukum dan wibawa KPK jatuh di mata masyarakat dan KPK dipandang rendah oleh saksi-saksi yang harusnya patuh hukum," kata Boyamin.

Ia juga mengingatkan bahwa sikap terhadap saksi yang mangkir dapat berdampak pada kepatuhan saksi lain yang dipanggil penyidik. Jika tidak ada tindak lanjut yang dinilai memadai, menurut dia, kondisi tersebut berpotensi mendorong saksi lain mengabaikan panggilan pemeriksaan.

"Tindakan KPK ini akan berdampak calon-calon saksi akan makin membangkang terhadap panggilan KPK karena tidak adanya risiko apa pun," tegasnya.

MAKI Persoalkan Konsistensi Penegakan Hukum

Boyamin turut membandingkan penanganan terhadap saksi dari kalangan masyarakat kecil dengan perlakuan terhadap saksi yang memiliki jabatan publik.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Menteri Haji dan Umrah Gus Irfan Akui Angkat Anaknya jadi Tenaga Ahli: Bilang Bekerja Sukarela Tak Digaji

Oleh Redaksi · 25 Okt, 10.49 WIB

BANDA ACEH - Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan mengakui jika anaknya menjadi tenaga ahli di kementerian yang dipimpinnya. Gus Irfan mengatakan, anak dan sejumlah santrinya bekerja secara sukarela selama tiga hingga empat bulan tanpa memperoleh gaji, sejak terlibat pembentukan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), sebelum akhirnya berubah menjadi kementerian.

Irfan mengatakan, ketika dirinya bersama wakil menteri dilantik untuk memimpin BP Haji pada akhir Oktober 2024, lembaga tersebut belum memiliki struktur organisasi, kantor, maupun staf pendukung yang memadai.

"Keluar dari istana kita enggak punya staf, kita enggak punya kantor, kita enggak punya apa-apa," kata Menhaj dalam keterangan tertulis, Minggu (25/10).

Dalam situasi tersebut, sejumlah orang terdekat ikut membantu proses pembentukan lembaga. Irfan menyebut anak dan para santrinya turut bekerja secara sukarela.

"Akhirnya Bang Dahnil (Wamenhaj sekarang) disambut timnya dari Kementerian Pertahanan, saya disambut santri-santri saya dan sama anak saya. Dan mereka ini yang tanpa diminta membantu pembentukan badan penyelenggara haji itu. Tanpa gaji tanpa apa-apa selama tiga atau

empat bulan. Itu yang terjadi," klaimnya.

Gus Irfan mengungkapkan, sejumlah orang yang sebelumnya membantu kemudian diangkat sebagai tenaga ahli. Menurutnya, pengangkatan tersebut dilakukan terhadap mereka yang dinilai memiliki kompetensi sesuai kebutuhan lembaga.

Sementara itu, sebagian lainnya memilih kembali ke pondok pesantren maupun menjalankan aktivitas masing-masing.

"Sampai kemudian ada beberapa yang saya masukkan menjadi tenaga ahli, ada sebagian kembali ke basic-nya tuh ada yang balik ke pondok, ada yang balik ini, karena mereka hanya sekedar ikhlas membantu," tuturnya.

Irfan turut membeberkan jumlah posisi tenaga pendukung yang tersedia bagi menteri, serta keputusan yang diambilnya dalam mengisi posisi tersebut.

"Kementerian Haji, sebagai menteri saya punya hak untuk menetapkan tiga staf khusus, saya ambil cuma satu. Saya dapat lima tenaga ahli, saya ambil cuma empat," urainya.

Ia pun tak memungkiri, Kementerian Haji dan Umrah masih menghadapi kekurangan pegawai. Berdasarkan analisis jabatan, kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di kementerian tersebut diperkirakan mencapai sekitar 7.000 orang.

Irfan menyebut jumlah pegawai yang tersedia sekitar 3.200 orang.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Tok! Hakim Tolak Eksepsi Febrie Adriansyah

Oleh Redaksi · 26 Okt, 14.03 WIB



BANDA ACEH — Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, menolak perlawanan atau eksepsi mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Hakim memerintahkan, jaksa penuntut umum (JPU) untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Kajari Bandung itupun.

Putusan sela tersebut, dibacakan hakim ketua Ahmad Fijarsyah Joko Sutrisno bersama hakim anggota Sunoto, Sutisna Sawati, Mardiantos, dan Ida Ayu Mustikawati di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (26/10/2026).

Dalam amar putusannya, majelis hakim memerintahkan JPU melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Febrie Adriansyah.

"Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Febrie Adriansyah," kata Hakim Ketua Ahmad Fijarsyah Joko Sutrisno saat membacakan putusan sela, di persidangan, Senin (26/10/2026).

Majelis juga menetapkan biaya perkara ditanggihkan hingga putusan akhir.

Penolakan eksepsi tersebut, membuat perkara Febrie berlanjut ke tahap pemeriksaan pokok perkara, termasuk pembuktian dan menghadirkan pemeriksaan saksi-saksi.

Majelis hakim menilai, keberatan (eksepsi) mengenai tidak

detailnya asal-usul harta kekayaan yang diduga berkaitan dengan tindak pidana merupakan persoalan pembuktian, bukan alasan untuk menyatakan surat dakwaan tidak jelas atau batal demi hukum.

Salah satu harta kekayaan yang diuraikan dalam dakwaan adalah emas seberat 74 kilogram dan sejumlah valuta asing. Majelis membedakan kejelasan uraian surat dakwaan dari pembuktian mengenai kebenaran asal-usul harta tersebut.

Penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan keterkaitan harta kekayaan itu dengan tindak pidana asal dalam pemeriksaan pokok perkara.

JPU sebelumnya, meminta majelis hakim menolak seluruh nota perlawanan atau eksepsi yang diajukan Febrie bersama tim penasihat hukumnya. Jaksa menilai surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap.

Sebaliknya, Febrie juga meminta majelis hakim membatalkan surat dakwaan, mengembalikannya berkas perkara beserta barang bukti kepada JPU, serta memerintahkan agar dirinya dikeluarkan dari tahanan.

Penasihat hukum Febrie juga mempersoalkan konstruksi hukum yang berkaitan dengan peran Ferry Yanto Hongkiriwang alias Ferry Boboho dalam perkara dugaan pemerasan dan TPPU.

Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, majelis hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara untuk menguji dakwaan JPU melalui pembuktian dan menghadirkan sejumlah saksi di persidangan

NASIONAL

Mantan Panglima TNI Laksamana Purn Widodo AS Meninggal Dunia

Oleh Redaksi · 25 Okt, 10.39 WIB

BANDA ACEH - Mantan Panglima TNI Laksamana (Purn) Widodo Adi Sutjipto (AS) meninggal dunia, Minggu (25/10/2026). Kabar meninggalnya Widodo disampaikan akun Instagram Koarmada RI, @koarmada_ri.

Dalam unggahannya, Koarmada RI mengunggah foto ucapan belasungkawa atas meninggalnya Widodo.

"Pangkoarmada RI Turut Berduka Cita Atas Wafatnya Laksamana TNI (Purn) Widodo Adi Sutjipto Panglima Tentara Nasional Indonesia Ke-14," tulis @koarmada_ri dalam keterangan unggahan.

Koarmada RI juga mendoakan

arwah Widodo AS dalam unggahannya.

"Teriring doa, semoga husnul khotimah, mendapatkan rahmat dan maghfiroh dari Allah Subhanahu Wata'ala. Aamiin Yaa Rabbal Alamin," tulis @koarmada_ri.

Diketahui, pria kelahiran Boyolali, Jawa Tengah, 1 Agustus 1944 itu diangkat menjadi Panglima TNI periode 1999-2002 oleh Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Widodo AS menjabat Panglima TNI menggantikan Wiranto.

Serah terima jabatan (sertijab) dari Wiranto kepada Widodo A.S dilakukan di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, pada 4 November 1999.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



www.harianaceh.co.id · Senin, 26 Oktober 2026 · Halaman 8 dari 26

NASIONAL

Gerindra Sebut Presiden Prabowo Tak Punya Kewenangan Berhentikan Wapres Gibran

Oleh Redaksi · 26 Okt, 09.41 WIB



BANDA ACEH - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara sepihak. Ia mengingatkan agar desakan Politik terkait pemberhentian Wakil Presiden tidak ditempatkan seolah menjadi kewajiban konstitusional Presiden.

Pernyataan tersebut disampaikan Azis merespons polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai persyaratan pendidikan Gibran, yang belakangan berkembang menjadi desakan pemakzulan.

Salah satu desakan muncul dari pakar hukum tata negara Denny Indrayana yang memperingatkan adanya potensi Presiden Prabowo dimundurkan apabila persoalan Gibran tidak diselesaikan.

“Presiden tidak mempunyai kewenangan memberhentikan Wakil Presiden secara sepihak,” tulis Azis dalam opininya bertajuk Demokrasi Pun Memiliki Aturan dan Waktunya.

Azis menjelaskan, konstitusi telah menyediakan mekanisme khusus untuk memberhentikan Presiden maupun Wakil Presiden melalui Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Proses tersebut harus diawali melalui mekanisme di DPR, dilanjutkan dengan pemeriksaan dan putusan MK atas pendapat DPR, sebelum akhirnya diputuskan oleh MPR sesuai persyaratan konstitusional.

Dengan demikian, Azis menilai seruan agar Presiden Prabowo menggerakkan koalisi partai politik untuk memulai proses pemakzulan Gibran harus dipahami sebagai tuntutan politik, bukan kewaji-

ban hukum yang muncul secara otomatis.

“Presiden tidak dapat dibebani kesalahan konstitusional semata-mata karena belum mengikuti kehendak mereka,” tegasnya.

Azis turut mengulas Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam perkara tersebut, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum.

Ia mengakui pertimbangan MK memuat persoalan mengenai bukti pendidikan Gibran. Namun, menurutnya, hal itu perlu dibedakan dari amar putusan yang tidak membatalkan jabatan Gibran maupun memerintahkan pemberhentiannya.

“Tidak seorang pun berwenang menambahkan perintah pemberhentian yang tidak dijatuhkan Mahkamah,” tulis Azis.

Ia menekankan bahwa jalur pemakzulan tetap terbuka sebagai mekanisme pertanggungjawaban konstitusional, sepanjang dilaksanakan berdasarkan alasan, pembuktian, dan prosedur yang sah.

“Jalur pemakzulan tetap merupakan bagian dari konstitusi, tetapi penggunaannya menuntut alasan dan pembuktian yang ditentukan konstitusi pula. Ia tidak boleh diperlakukan sebagai perpanjangan tanpa batas dari pertarungan pemilu,” ujarnya.

Azis mengingatkan bahwa kepastian politik juga menyangkut kepentingan masyarakat. Menurutnya, energi pemerintah semestinya dapat diarahkan untuk memperbaiki pendidikan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat ekonomi keluarga.

“Rakyat tidak menyerahkan mandat agar negara terus berada di ruang sengketa,” pungkasnya

NASIONAL

Mahasiswa UI Bilang Mau Jadi Presiden saat Rapat DPR, Sahroni: Jangan Sampai Ijazahnya Palsu

Oleh Redaksi · 26 Okt, 17.26 WIB



BANDA ACEH - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni memotivasi mahasiswa Universitas Indonesia (UI) agar berani bermimpi besar dan terus mengasah kemampuan dalam kondisi apa pun. Dia mengingatkan, ijazah bukan satu-satunya penentu kesuksesan, tetapi dokumen pendidikan tersebut tidak boleh palsu.

Pernyataan itu disampaikan Sahroni saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/10/2026).

Mulanya, Sahroni bertanya kepada para mahasiswa mengenai cita-cita mereka. Salah satu mahasiswa kemudian menjawab ingin menjadi presiden.

"Saya mau jadi presiden, pimpinan," kata salah satu mahasiswa.

Mendengar jawaban tersebut, Sahroni mengaku kagum. Dia mendorong para mahasiswa untuk terus mengembangkan kemampuan berpikir dan menjaga semangat belajar di mana pun berada.

"Tapi prinsip smart kita berpikir kapan pun dan di mana pun, kalian harus punya itu (cita-cita)," kata Sahroni.

Menurut Sahroni, kemampuan berpikir dan kecerdasan menjadi hal penting yang perlu dimiliki seseorang untuk mencapai cita-cita. Dia juga menekankan ijazah bukan satu-satunya ukuran kemampuan seseorang.

Meski demikian, Sahroni mengingatkan pentingnya memiliki ijazah yang sah sebagai bukti telah menempuh pendidikan.

"Ijazah tidak jadi level utama, tapi ijazah perlu, jangan sampai ada ijazah palsu," pungkasnya.

NASIONAL

Jokowi Jenius Taklukkan Hati Rakyat Lewat Gaya Berpakaian

Oleh Redaksi · 26 Okt, 13.40 WIB



BANDA ACEH - Gaya berpakaian Joko Widodo yang konsisten mengenakan kemeja putih dan celana hitam tetap menjadi ciri khasnya, bahkan setelah tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI.

Fashion designer Dicky Mario menilai, pilihan busana tersebut bukan sekadar persoalan gaya, melainkan juga mencerminkan kesederhanaan yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

“Bapak Jokowi itu memang jenius karena dia mempelajari psikologis rakyatnya dia. Putih hitam kan lambang yang sangat bersahaja,” kata Dicky di kanal Youtube Hendri Satrio, Senin, 26 Oktober 2026.

Menurutnya, perpaduan putih dan hitam memiliki kesan sederhana yang mudah diterima berbagai kalangan.

Ia mengibaratkan kombinasi warna tersebut seperti pakaian dasar yang dikenakan saat masa orientasi mahasiswa atau ospek.

“Jokowi ingin menandakan bahwa dia sederhana walaupun kadang di beberapa momen dia pakai batik,” ujarnya.

Dicky juga menyoroti pilihan Jokowi mengenakan batik bermotif parang serta pakaian adat dalam sejumlah kesempatan.

Menurutnya, penggunaan busana tersebut turut memperlihatkan kedekatan Jokowi dengan tradisi dan budaya Indonesia.

Ia menjelaskan, motif parang dalam tradisi Jawa dahulu memiliki kaitan dengan lingkungan kerajaan. Namun, penggunaannya kini semakin meluas di kalangan masyarakat.

Bagi Dicky, konsistensi Jokowi mengenakan kemeja putih dan celana hitam menjadi identitas yang melekat pada dirinya.

“Dia nggak peduli orang pakai apa dia tetap hitam putih,” tandasnya.

NASIONAL

Prabowo Belum Sepenuhya Lepas dari Bayang-Bayang Jokowi

Oleh Redaksi · 25 Okt, 13.40 WIB

BANDA ACEH -Presiden Prabowo Subianto dinilai belum mampu memutus sepenuhnya pengaruh Joko Widodo meski telah memasuki tahun kedua pemerintahannya.

Menurut Guru Besar Universitas Airlangga, Prof Henri Subiaktio, Prabowo masih memberi ruang bagi kepentingan dan kesinambungan kebijakan orang-orang Jokowi. Kondisi itu membuat arah kepemimpinan Prabowo dinilai belum menunjukkan ketegasan dalam menghadapi warisan pemerintahan sebelumnya.

“Prabowo itu mix signal. Kesannya dia berkuasa, tapi tak mampu menghilangkan bayang bayang mantan bos yang dulu mengangkatnya jadi jenderal penuh dan jadi kepala negara,” kata Henri

lewat akun X miliknya, Minggu, 25 Oktober 2026.

Ia menilai gaya kepemimpinan dan komunikasi Prabowo memang berbeda dari Jokowi. Namun, keduanya dinilai masih menjaga hubungan karena memiliki kepentingan masing-masing.

“Walau sekarang sudah tidak seharmonis di awal-awal Pemerintahan, tapi Prabowo nampak tak berani putus total apalagi berhadapan,” ujarnya.

Henri juga menyoroti sikap Prabowo terhadap polemik ijazah Jokowi dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurutnya melemahkan Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari sisi moral. Ia menilai Prabowo belum memberikan res-

pons tegas terhadap persoalan tersebut.

“Isu ijazah dan putusan MK yg sangat melemahkan Jokowi Gibran dari sisi moral pun tidak direspon tegas oleh Prabowo. Seolah hanya jadi catatan dan simpanan peluru yang tidak harus terburu digunakan,” katanya.

Di sisi lain, Henri mengkritik cara sebagian masyarakat memandang kepemimpinan Jokowi. Ia mengakui pernah percaya pada penampilan dan pernyataan Jokowi, yang menurutnya mampu membangun citra sebagai sosok sederhana dan dekat dengan rakyat.

“Saya pernah percaya dan ter-tipu juga dengan ucapan dan penampilan yang penuh polesan Jokowi. Sekarangpun masih

banyak yang buta terhadap sosok ini, hanya karena suka dengan hasil kerja pemerintahannya dulu yg terlihat sukses membangun infrastruktur,” tulisnya.

Henri menilai keberhasilan pembangunan infrastruktur yang terlihat secara fisik tidak cukup untuk menilai keseluruhan kinerja pemerintahan. Ia menyoroti konsekuensi utang pembangunan, kondisi Politik, serta dampak terhadap etika dan tatanan demokrasi.

“Padahal pembangunan infrastruktur yang ‘nampak sukses’ itu aslinya membawa bom waktu, saat tagihan tagihan hutang harus dibayarkan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

KPK Tegaskan Laporan Audit Forensik Sah di Pengadilan, Tak Harus dari BPK

Oleh Redaksi · 26 Okt, 09.31 WIB



BANDA ACEH -Komisi Pembe-rantasan Korupsi (KPK) menegaskan laporan penghitungan keru-gian keuangan negara (PKKN) oleh Unit Akuntansi Forensik (AF) KPK sah dan diakui penga-dilan.

KPK menyatakan penghitungan kerugian negara tidak hanya dapat dilakukan Badan Pemeriksa Keua-ngan (BPK), tetapi juga auditor dan ahli lain yang memenuhi kom-petensi serta ketentuan hukum.

Penegasan ini disampaikan menjelang sidang lanjutan uji materiil ketentuan penghitungan kerugian keuangan negara dalam UU 1/2023 tentang KUHPP di Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini, Senin, 26 Oktober 2026.

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, keabsahan penghitu-ngan oleh auditor di luar BPK

telah memiliki landasan hukum, salah satunya Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012.

"Hal ini berkaitan dengan kaidah Putusan MK nomor 31/PUU-X/2012 yang menegaskan wewenang KPK untuk berko-ordinasi dengan BPKP, BPK, dan instansi lain dalam rangka pem-buktian tindak pidana korupsi," kata Budi kepada wartawan, Senin, 26 Oktober 2026.

Putusan tersebut, lanjut Budi, juga memungkinkan lembaga anti-rasuah membuktikan sendiri per-kara yang ditanganinya, tidak hanya bergantung pada temuan BPKP maupun BPK.

"Misalnya dengan mengundang ahli atau meminta bahan dari inspektorat atau pihak lain, yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam PKKN dan/atau

membuktikan perkara," terang Budi.

Atas dasar itu, KPK menyatakan laporan penghitungan kerugian negara dapat menggunakan hasil kerja tenaga profesional yang memiliki kompetensi di bidang-nya.

"Karena KPK dapat membukti-kan sendiri, KPK dapat menggu-nakan laporan PKKN dari pihak profesional yang kompeten, ter-masuk akuntan publik, auditor, atau akuntan forensik," tegas Budi.

KPK menyebut setidaknya ter-dapat tujuh penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berkait-an dengan kerugian keuangan negara dan dituntaskan melalui penghitungan oleh Unit AF KPK.

"Adapun beberapa di antaranya terkait TPK pengadaan crane pada

PT Pelindo dengan tahun sidang pada 2021. Kemudian, TPK ter-kait kerugian keuangan negara pengadaan helikopter angkut pada TNI AU (tahun 2022)" ungkap Budi.

Selain itu, terdapat perkara ter-kait pekerjaan pengajuan penyalu-ran bantuan sosial pada PT Bhanda Ghara Reksha yang disi-dangkan pada 2024.

KPK juga menyebut perkara pekerjaan retrofit system soot blowing PLTU Bukit Asam pada PT PLN, pengadaan tanah di Rorotan oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya, serta kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP yang disidangkan pada 2025.

NASIONAL

Hak Angket Ijazah Gibran Sudah Masuk Angin

Oleh Redaksi · 26 Okt, 13.43 WIB



BANDA ACEH - Belum adanya kepastian mengenai kelanjutan wacana Hak Angket DPR terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disorot Pengamat Politik Adi Prayitno.

Hingga kini, belum terlihat tanda-tanda yang memastikan hak angket tersebut akan ditolak maupun mendapat dukungan untuk dilanjutkan.

"Kalau kita baca regulasinya karena salah satu syaratnya hanya diusulkan oleh 25 anggota DPR dan minimal diusulkan dua fraksi," kata Adi, Senin, 26 Okto-ber 2026.

Menurutnya, secara kalkulasi Politik, pemenuhan syarat untuk mengajukan hak angket relatif mudah. Namun, belum terlihat langkah konkret dari anggota DPR

untuk merealisasikan wacana ter-sebut.

Adi menduga, sikap hati-hati anggota DPR tidak terlepas dari sensitifnya persoalan ijazah yang berkaitan dengan orang nomor dua di Republik Indonesia tersebut.

"Jika dilihat sepertinya kawan-kawan DPR itu sangat berhati-hati. Karena ingin menyangkut terkait dengan ijazah yang dimiliki wakil presiden RI ini itu yang cukup sensitif," ujarnya.

Ia pun menilai belum jelas apakah wacana hak angket terse-but masih memiliki dorongan poli-tik yang kuat atau justru mulai kehilangan momentum di parle-men.

"Jangan-jangan hak angket ini sudah masuk angin, sudah tidak bergairah untuk diwujudkan di DPR karena dianggap sesuatu yang tidak seksi secara politik," tandasnya.

NASIONAL

Politisi Gerindra Respons Pernyataan Denny Indrayana Soal Prabowo

Oleh Redaksi · 26 Okt, 08.17 WIB



BANDA ACEH -Partai Gerindra memberikan tanggapan keras ter-hadap peringatan pakar hukum Denny Indrayana, yang menyebut Presiden Prabowo Subianto beris-iko dilengserkan jika tidak segera bersikap terkait posisi Wakil Pre-siden Gibran Rakabuming Raka.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menilai pernyataan terse-but perlu diuji secara konstitusio-nal. Hal ini penting dilakukan agar tidak menimbulkan kesan bahwa Presiden memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi desakan pemberhentian Wakil Presiden.

"Jika yang dimaksud Denny adalah risiko Politik, ia perlu men-jelaskannya sebagai perkiraan politik beserta dasar penilaiannya. Membiarkan perkiraan itu terde-ngar seperti konsekuensi hukum akan mengaburkan batas antara analisis dan tekanan," tulis Azis dalam keterangannya, dikutip Senin 26 Oktober 2026.

Lebih lanjut, Azis menjelaskan bahwa Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 telah mengatur secara

tegas alasan serta mekanisme pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden. Proses tersebut melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR dengan persyaratan yang ketat.

"Keengganan memenuhi desa-kan sekelompok orang bukanlah alasan pemberhentian yang berdiri sendiri dalam Pasal 7A," tegasnya.

Azis juga menyinggung Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, yang menyatakan bahwa permohonan terkait persya-ratan pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena para pemo-hon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).

Oleh karena itu, ia mengingat-kan agar pandangan hukum tidak berkembang menjadi tekanan politik yang melangkahi kewena-ngan lembaga negara.

"Seorang pakar memiliki tang-gung jawab lebih besar justru karena masyarakat mempercayai keahliannya. Gelar akademik tidak boleh menjadi pengganti argumentasi," pungkas Azis.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Ray Rangkuti: Nusron Sebaiknya Dinonaktifkan

Oleh Redaksi · 25 Okt, 08.15 WIB

BANDA ACEH - Dua kali ketida-khadiran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertana-han Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam agenda pemeriksaan saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memunculkan desakan agar Presi-den Prabowo Subianto mengambil langkah tegas. Pengamat Politik Ray Rangkuti menyarankan Nusron dinonaktifkan sementara atau dicopot melalui perombakan kabinet.

Nusron seharusnya dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan suap di lingkungan ATR/BPN pada 7 Oktober dan 15 Oktober 2026. Namun, ia tidak hadir dengan alasan memiliki agenda lain.

Situasi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai tindak lanjut KPK terhadap keti-dakhadiran Nusron, termasuk belum adanya keputusan mengenai

langkah pemanggilan berikutnya. Sikap Presiden Prabowo terhadap menteri-nya itu juga menjadi sorotan.

Ray menilai, Presiden memiliki dua opsi, yakni menonaktifkan Nusron sementara atau langsung menggantinya melalui peromba-kan kabinet.

"Ya itu tadi seperti yang dise-butkan oleh Bung Iwan (Kurnia-wan, Ketua Gerakan Cinta Pra-bowo) ya ada dua pilihan tuh. Per-tama nonaktifkan dulu atau yang sekaligus di-reshuffle," kata Ray dikutip dalam salah satu dialog, Jumat (23/10/2026).

Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani tersebut, langkah itu dapat menjadi sinyal bagi KPK untuk menentukan tindakan selan-jutnya sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam pem-beantasan korupsi.

"Nah, itu juga memberi sinyal yang lebih kuat kepada KPK

untuk segera bertindak apakah akan melakukan proses penjempu-tan paksa atau dan sebagainya dan sebagainya gitu ya," ujarnya.

Ray juga menilai, sikap Presi-den dalam menangani persoalan tersebut dapat memengaruhi per-sepsi masyarakat terhadap keseri-usan pemerintah memberantas korupsi tanpa pandang bulu.

"Nah, dan lebih juga memberi sinyal yang kuat kepada masyara-kat bahwa Pak Prabowo tidak pandang dulu tadi soal pemberantasan korupsi gitu," ucapnya.

Ray Ingatkan Prabowo Ray mengingatkan, persoalan tersebut berpotensi menyeret nama Presiden Prabowo apabila terus berlarut-larut tanpa kejelasan langkah penanganan.

Ia menilai, situasi itu dapat memunculkan asumsi di tengah masyarakat bahwa Nusron memi-liki dukungan dari sosok kuat di lingkaran kekuasaan.

NASIONAL

Silfester Matutina Diduga Masuk List Saksi Sidang Ijazah Jokowi

Oleh Redaksi · 25 Okt, 07.16 WIB

BANDA ACEH -Sidang lanjutan perkara dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa yang sedang berlang-sung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, berpeluang meng-hadirkan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina sebagai saksi.

Informasi tersebut diungkap Dokter Tifa saat menjadi nara-sumber di podcast Madilog, You-Tube Forum Keadilan, baru-baru ini.

"Kehadiran Silfester Matutina jelas sangat aneh," kata Direktur ABC Riset & Consulting Erizal, dikutip Minggu 25 Oktober 2026.

Nama Silfester yang divonis 1 tahun 6 bulan (1,5 tahun) penjara oleh Mahkamah Agung pada 20 Mei 2019 melalui Putusan Kasasi No.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Adi Suparto: Nusron Cueki Panggilan, KPK “Letoy”?

Oleh Redaksi · 26 Okt, 08.32 WIB



Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Ketidakhadiran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam pemeriksaan sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi penegakan hukum, terutama ketika pihak yang dipanggil merupakan pejabat negara.

Apa kah KPK juga “letoy” terhadap pembantu Presiden Prabowo Subianto itu?

Pakar Komunikasi Politik dan Kebijakan Publik, Adi Suparto, menilai persoalan tersebut menyentuh prinsip mendasar dalam kehidupan bernegara, yakni kesetaraan setiap warga di hadapan hukum.

“Ketika aturan berlaku berbeda bagi orang yang berbeda, di situlah kewibawaan hukum mulai retak.

Kasus yang sedang berlangsung mempertanyakan satu hal mendasar: apakah hukum di negeri ini memiliki satu ukuran untuk semua, atau berubah wujud tergantung siapa yang dipanggil?” ujar Adi Suparto dalam pernyataan mengenai konsistensi penegakan hukum, terutama ketika pihak yang dipanggil merupakan pejabat negara.

Sorotan itu muncul setelah Nusron tidak menghadiri pemanggilan KPK sebagai saksi. Ketidakhadirannya kemudian menjadi perhatian karena pemeriksaan saksi merupakan bagian penting dalam proses pengumpulan keterangan untuk mengungkap perkara yang sedang ditangani penyidik.

Plt. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan tim penyidik masih mengevaluasi alasan ketidakhadiran Nusron

serta kebutuhan pemeriksaannya dalam konstruksi perkara tersebut.

“Tim penyidik masih mengevaluasi alasan ketidakhadiran Nusron serta kebutuhan pemeriksaan dalam konstruksi perkara tersebut. Terakhir sudah kami sampaikan bahwa itu akan dievaluasi oleh tim penyidik seperti apa, karena menyangkut pemanggilan seorang saksi itu kan sudah ada hukum acaranya,” kata Achmad.

Pernyataan tersebut menempatkan keputusan mengenai langkah selanjutnya pada evaluasi penyidik. Namun, alasan ketidakhadiran Nusron dan hasil evaluasi KPK menjadi informasi penting yang perlu dijelaskan agar publik dapat memahami dasar penanganan perkara tersebut.

Kritik juga disampaikan pengamat hukum Boyamin Saiman. Ia memperingatkan bahwa penanga-

nan ketidakhadiran saksi tanpa penjelasan yang memadai dapat memengaruhi kepatuhan saksi lain terhadap panggilan penyidik.

“Tindakan KPK ini akan berdampak calon-calon saksi akan makin membangkang terhadap panggilan KPK karena tidak adanya risiko apa pun,” ujar Boyamin.

Sementara itu, Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) menyatakan telah mengadukan persoalan tersebut kepada Dewan Pengawas KPK.

Pengaduan itu dimaksudkan untuk meminta pemeriksaan atas penanganan ketidakhadiran saksi, sekaligus meminta Dewan Pengawas menilai ada atau tidaknya pelanggaran etik maupun ketidakprofesionalan dalam pelaksanaan tugas.

NASIONAL

MAKI Adukan Seluruh Pimpinan KPK ke Dewas terkait Nusron Wahid, Ada Apa?

Oleh Redaksi · 25 Okt, 20.20 WIB



BANDA ACEH - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengadukan seluruh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Aduan ini dilayangkan karena MAKI menilai pimpinan KPK tidak tegas menyikapi dua kali ketidakhadiran Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid dalam panggilan pemeriksaan.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengajukan aduan tersebut secara daring pada Minggu (25/10/2026). Dia menilai KPK seharusnya mengambil tindakan lebih tegas, termasuk menerbitkan surat perintah membawa terhadap Nusron.

“Mestinya KPK tegas dengan cara jemput paksa terbitkan surat perintah membawa kepada Nusron Wahid,” ujar Boyamin, Minggu (25/10/2026).

Boyamin mengatakan, persoalan saksi yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan bukan hanya terjadi dalam kasus Nusron. Dia juga menyinggung ketidakhadiran Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Muryanto Amin dalam kasus proyek jalan di Sumut serta Witjaksono dalam kasus Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

“Dengan abai, takut dan lemotnya KPK atas mangkirnya panggilan saksi-saksi, maka menjadikan wibawa hukum dan wibawa KPK jatuh di mata masyarakat. Dan KPK dipandang rendah oleh saksi-saksi yang harusnya patuh hukum,” kata Boyamin.

Menurutnya, sikap KPK yang dinilainya tidak tegas dapat memengaruhi kepatuhan saksi lain terhadap panggilan penyidik. Dia khawatir tidak adanya tindakan lanjutan membuat saksi merasa dapat mengabaikan panggilan pemeriksaan tanpa konsekuensi.

“Tindakan KPK ini akan berdampak calon-calon saksi akan makin membangkang terhadap panggilan KPK karena tidak adanya risiko apa pun,” ujar Boyamin.

Dia juga membandingkan penanganan saksi dari kalangan masyarakat dengan kasus yang melibatkan pihak lain. Boyamin mencontohkan dirinya yang pernah dikenai surat perintah membawa meski baru sekali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.

Atas dasar itu, MAKI meminta Dewas KPK menindaklanjuti aduan tersebut. Boyamin berharap Dewas memeriksa dugaan pelanggaran etik dan ketidakprofesionalan pimpinan maupun penyidik KPK dalam menangani saksi yang tidak memenuhi panggilan.

“MAKI sangat perlu mengadukan masalah ini kepada Dewan Pengawas KPK untuk memberikan teguran dan sanksi kepada ...

EROPA

Demo Prancis Kembali Rusuh, 70 Ribu Aparat Dikerahkan

Oleh Redaksi · 25 Okt, 13.45 WIB



BANDA ACEH -Gelombang demonstrasi di Prancis kembali berujung bentrokan pada Sabtu waktu setempat, 24 Oktober 2026.

Aksi yang diikuti ratusan ribu orang untuk memprotes kenaikan biaya hidup dan ketimpangan sosial itu berlangsung relatif damai pada awalnya, sebelum keributan pecah di Paris dan Marseille saat malam tiba.

Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat sekitar 410 ribu orang mengikuti demonstrasi di berbagai wilayah. Namun, serikat pekerja mengklaim jumlah demonstran sebenarnya mencapai dua kali lipat dari angka resmi pemerintah.

Aksi terbesar berlangsung di pinggiran tenggara Paris dengan sedikitnya 110 ribu orang turun ke jalan menyuarakan penolakan terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah.

Situasi memanas setelah demonstrasi berakhir. Di Paris, polisi antihuru-hara menembakkan gas air mata dan menyemprotkan meriam air untuk membubarkan sekitar 500 pemuda bertudung yang terlibat keributan.

Sementara di Marseille, sejumlah pemuda membakar tempat sampah untuk memblokir jalan serta melempari aparat dengan batu dan botol.

Polisi melaporkan sejumlah toko, termasuk dua toko perhiasan, dijarah. Bentrokan juga terjadi di Lyon, Bordeaux, Grenoble, Clermont-Ferrand, Lille, Rennes, Nantes, dan Toulouse.

Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kelompok-kelompok berisiko tinggi memisahkan diri dari barisan utama demonstrasi untuk melakukan aksi kekerasan.

“Hampir di setiap aksi demonstrasi, kami melihat terbentuknya kelompok-kelompok berisiko tinggi ini. Mereka memisahkan diri dari kelompok utama dan berupaya melakukan tindakan kekerasan,” kata Nunez, dikutip Minggu, 25 Oktober 2026.

Dia menuding aktivis sayap kiri radikal dan kelompok kriminal berupaya memicu kerusuhan. Meski demikian, ia menilai kekerasan kali ini tidak seintens pekan sebelumnya.

Pemerintah mengerahkan 70 ribu personel polisi dan gendarmerie, atau 10 ribu lebih banyak dibandingkan pekan sebelumnya, untuk mencegah terulangnya kerusuhan pada 17 Oktober.

Pengamanan ketat membuat sebagian pusat kota Paris menyempit kawasan yang diisolasi.

Sejumlah toko menutup atau melapisi etalase mereka, lebih dari 20 stasiun metro berhenti beroperasi, sedangkan museum Louvre, Musee d’Orsay, dan Paris Opera tutup sementara sebagai langkahantisipasi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ACEH

Dari Tilawah hingga Karya Tulis Al-Quran, 665 Peserta Bersaing di MTQ ke-35 Aceh Besar

Oleh Redaksi · 25 Okt, 17.20 WIB

BANDA ACEH, KOTA JANTHO – Sebanyak 665 peserta dari 23 kafilah kecamatan mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXXV tingkat Kabupaten Aceh Besar tahun 2026. Ajang yang berlangsung selama tujuh hari, mulai 24 hingga 31 Oktober, tersebut digelar di sembilan arena yang tersebar di Kecamatan Kuta Baro.

“MTQ ini menjadi momentum penting untuk kembali menghidupkan pembinaan tilawatil Quran di Aceh Besar. Melalui berbagai cabang yang diperlombakan, kita berharap dapat menjaring qari dan qariah terbaik yang mampu membawa nama daerah ke tingkat yang lebih tinggi,” kata Ketua Lembaga

Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Aceh Besar, Farhan AP.

Ia menjelaskan, MTQ XXXV merupakan kelanjutan dari MTQ XXXIV yang digelar pada 2018. Setelah sempat tidak terlaksana akibat pandemi COVID-19, kegiatan tersebut kembali diselenggarakan pada 2026 atas inisiasi Bupati Aceh Besar, H. Muharram Idris atau Syech Muharram.

Menurutnya, pelaksanaan MTQ menjadi kesempatan untuk mengukur kemampuan peserta sekaligus menyeleksi qari, qariah, hafiz, dan hafizah yang dipersiapkan mewakili Aceh Besar pada MTQ tingkat provinsi dan nasional.

Beragam cabang dipertandingkan dalam kegiatan tersebut, meliputi tilawah, qira’ah sab’ah, tartil, tahfiz, tafsir Al-Quran, fahmil Quran, syarhil Quran, khattil Quran, serta karya tulis ilmiah Al-Quran (KTIQ). Setiap cabang memiliki ketentuan dan kategori peserta sesuai tingkat kemampuan masing-masing.

Arena utama Lapangan Bung Cala menjadi lokasi perlombaan tilawah. Sementara itu, cabang qira’ah sab’ah dipusatkan di Masjid Baitul Makmur Ateuk, sedangkan lomba tartil dan tahfiz satu hingga lima juz berlangsung di Meunasah Babah Jurong.

Untuk cabang tahfiz 10, 20, dan 30 juz, perlombaan digelar di

Meunasah Bung Bak Jok. Adapun lomba tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia dilaksanakan di Meunasah Lampuuk.

Cabang syarhil Quran berlangsung di Aula Kantor Camat Kuta Baro. Sementara itu, fahmil Quran dan khattil Quran dipusatkan di Aula serta ruang kelas Dayah Daruzzahidin. Adapun perlombaan KTIQ berlangsung di laboratorium komputer dayah tersebut.

Perlombaan mencakup kategori putra dan putri, mulai dari golongan anak-anak, remaja, hingga dewasa sesuai ketentuan setiap cabang.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ACEH

Wakapolda Aceh Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Seulawah 2026

Oleh Redaksi · 26 Okt, 15:55 WIB



BANDA ACEH, BANDA ACEH — Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Latif Usman memimpin apel gelar pasukan Operasi Patuh Seulawah 2026 di Lapangan Mapolda Aceh, Senin, 26 Oktober 2026. Apel tersebut ditandai dengan penyematan pita tanda operasi kepada perwakilan personel sebagai simbol dimulainya operasi kepolisian yang berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026. Operasi Patuh Seulawah 2026 dilaksanakan di seluruh wilayah hukum Polda Aceh dengan melibatkan personel Polda Aceh serta Polres dan Polresta jajaran, didukung instansi terkait. Operasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, sekaligus mewujudkan keamanan, kesela-

matan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Provinsi Aceh. Dalam amanat Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan yang dibacakan Wakapolda, disampaikan bahwa lalu lintas memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian. Oleh karena itu, terciptanya kondisi lalu lintas yang tertib, aman, dan berkeselamatan membutuhkan komitmen serta tanggung jawab bersama antara kepolisian dan masyarakat. Operasi Patuh Seulawah 2026 mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, dan Berkeselamatan di Provinsi Aceh.” Pelaksanaannya mengedepankan langkah edukatif, preemtif, dan preventif, disertai penegakan hukum secara profesional dan proporsional terhadap pelanggaran

yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Sejumlah pelanggaran yang menjadi perhatian dalam operasi ini antara lain melawan arus, tidak menggunakan helm berstandar SNI, serta berkendara melebihi batas kecepatan. Pelanggaran tersebut dapat membahayakan keselamatan pengendara maupun pengguna jalan lainnya. Karena itu, masyarakat diimbau untuk senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, dan mengutamakan keselamatan selama berkendara. Kapolda Aceh juga menekankan agar seluruh personel yang terlibat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, profesional, dan humanis. Personel diharapkan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta memperkuat sinergi dengan TNI,

pemerintah daerah, instansi terkait, dan seluruh elemen masyarakat guna mendukung kelancaran pelaksanaan operasi. Selain itu, penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga perlu terus ditingkatkan agar kesadaran untuk tertib berlalu lintas tumbuh dari pemahaman tentang pentingnya keselamatan, bukan semata-mata karena adanya penindakan. Apel gelar pasukan tersebut turut dihadiri para pejabat utama Polda Aceh, personel Polisi Militer (Pom), perwakilan Dinas Perhubungan Aceh, serta personel yang terlibat dalam ...

ACEH

Bupati Aceh Besar Ikuti Rakor Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Oleh Redaksi · 26 Okt, 23:03 WIB



BANDA ACEH, KOTA JANTHO – Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat secara virtual dari Ruang Rapat Bupati Aceh Besar, Kota Jantho, Senin (26/10/2026). Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana. Dalam kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian juga didampingi langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono. Kegiatan ini diikuti oleh para kepala daerah dari tiga provinsi yang terdampak bencana. Rakor tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memantau perkembangan pemulihan pascabencana, mengevaluasi pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi, serta mengidentifikasi berbagai kebutuhan yang masih memerlukan penanganan lebih lanjut.

Dalam rapat itu, pemerintah kembali memaparkan hasil pemantauan dan evaluasi pembangunan serta pemulihan fasilitas dasar, jalan nasional, jembatan, dan rumah ibadah yang ditangani melalui kementerian terkait, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Melalui koordinasi berkelanjutan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak. Bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, keikutsertaan dalam rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait, terutama dalam mendukung percepatan pemulihan infrastruktur serta fasilitas publik yang terdampak bencana. Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris mengikuti kegiatan tersebut didampingi Asisten II Sekdakab Aceh Besar M. Ali, S.Sos., M.Si., Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Besar Ir. Syahrial Amanullah, S.T., Kadis Pertanian dan Kalaksa BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil, S.Sos., M.Si.***

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ACEH

Ribuan Masyarakat Padati Arena Pembukaan MTQ ke-35 Aceh Besar

Oleh Redaksi · 25 Okt, 10:47 WIB

BANDA ACEH, KOTA JANTHO — Ribuan masyarakat memadati arena pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-35 tingkat Kabupaten Aceh Besar di Lapangan Kemukiman Bung Cala, Kecamatan Kuta Baro, Sabtu (24/10/2026) malam. Meski sempat diguyur hujan gerimis, antusiasme masyarakat dari berbagai wilayah di Aceh Besar tetap tinggi untuk menyaksikan pembukaan agenda keagamaan tahunan tersebut. Sejak usai Magrib, masyarakat mulai berdatangan bersama keluarga dan kerabat. Arena kegiatan semakin ramai dengan kehadiran warga, tokoh masyarakat, serta

para kafilah yang mewakili kecamatan masing-masing. Gerimis yang sempat mengguyur lokasi tidak menyurutkan semangat masyarakat untuk mengikuti rangkaian pembukaan. Warga tetap bertahan di arena kegiatan, menunjukkan besarnya dukungan terhadap syiar Islam dan upaya pembinaan generasi Qurani di Kabupaten Aceh Besar. Salah seorang orang tua peserta dari Kecamatan Darul Kamal, Maimun, mengaku senang dapat menyaksikan langsung pembukaan MTQ ke-35. Menurutnya, pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten menjadi momen yang dinantikan masyarakat, terutama untuk kembali membangkitkan semangat

pembinaan Alquran setelah beberapa tahun tidak diselenggarakan. “Alhamdulillah, kami sangat senang karena sudah lama MTQ kabupaten tidak diselenggarakan. Terakhir sebelum Covid-19, yakni pada 2018, dan malam ini kembali digelar. Kami berharap MTQ ini bukan hanya menjadi acara tahunan, tetapi juga semakin mendorong anak-anak muda untuk belajar, membaca, dan memahami Alquran,” ujarnya. Ia berharap pelaksanaan MTQ dapat memotivasi para orang tua untuk semakin aktif membimbing anak-anak dalam pendidikan agama, baik di lingkungan keluarga maupun melalui balai pengajian dan lembaga pendidikan Alquran. Antusiasme serupa disampaikan Mirza, orang tua peserta dari Kecamatan Darul Imarah yang turut menyaksikan pembukaan MTQ. Ia menilai kegiatan tersebut memiliki nilai positif karena mempertemukan masyarakat dari berbagai kecamatan dalam suasana penuh kebersamaan. “Selain menjadi ajang perlombaan bagi para peserta, MTQ juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk bersilaturahmi. Kami berharap kegiatan ini berjalan lancar dan dapat melahirkan generasi yang mencintai Alquran serta mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari,” tuturnya.

Antusiasme serupa disampaikan Mirza, orang tua peserta dari Kecamatan Darul Imarah yang turut menyaksikan pembukaan MTQ. Ia menilai kegiatan tersebut memiliki nilai positif karena mempertemukan masyarakat dari berbagai kecamatan dalam suasana penuh kebersamaan. “Selain menjadi ajang perlombaan bagi para peserta, MTQ juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk bersilaturahmi. Kami berharap kegiatan ini berjalan lancar dan dapat melahirkan generasi yang mencintai Alquran serta mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari,” tuturnya.

ACEH

Wakil Wali Kota Sabang Hadiri Rapat FKKA, Bahas Isu Strategis Daerah

Oleh Redaksi · 25 Okt, 12:51 WIB

BANDA ACEH, SABANG – Wakil Wali Kota Sabang Suradji Junus menghadiri Rapat Dewan Pimpinan Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten dan Kota se-Aceh (FKKA), yang membahas isu strategis pembangunan, kebijakan keuangan, serta penguatan koordinasi antarpemerintah kabupaten dan kota di Aceh. Pertemuan yang berlangsung di Pendopo Wali Kota dipimpin Koordinator FKKA sekaligus Wali Kota Illiza Sa'aduddin Djamal. Forum ini menjadi wadah bagi Dewan Pimpinan FKKA periode 2025-2030 untuk mengevaluasi program kerja dan merumuskan langkah bersama dalam menyikapi berbagai tantangan pembangunan. Pembahasan mencakup kebijakan anggaran, pengelolaan keuangan daerah, penanganan pasca-

bencana, serta kebutuhan peningkatan pelayanan publik. Isu-isu tersebut menjadi perhatian bersama mengingat kebijakan pemerintah pusat dan provinsi turut memengaruhi pelaksanaan program di kabupaten dan kota. Wakil Wali Kota Sabang menilai koordinasi antarpemerintah kabupaten dan kota penting untuk menyamakan pandangan dalam menyikapi kebijakan pembangunan, sekaligus membuka ruang bagi setiap daerah untuk menyampaikan kebutuhan dan persoalan yang dihadapi. “Setiap daerah tentu memiliki kebutuhan dan tantangan masing-masing. Karena itu, melalui forum ini kita bisa saling bertukar pandangan dan menyampaikan persoalan yang dihadapi, sehingga ada masukan bersama untuk menyikapi kebijakan pembangunan ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ACEH

Dek Gam Apresiasi Polda Aceh Tangkap Penimbun Solar, Antrean di SPBU Mulai Menghilang

Oleh Redaksi · 26 Okt, 17.46 WIB



BANDA ACEH, BANDA ACEH – Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, mengapresiasi langkah tegas Kepolisian Daerah (Polda) Aceh dalam menindak para pelaku penimbunan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di Aceh.

Menurut Dek Gam, langkah penegakan hukum tersebut patut diapresiasi karena berdampak terhadap kelancaran masyarakat dalam memperoleh BBM bersubsidi, khususnya solar yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai aktivitas ekonomi dan transportasi.

Ia menilai, penindakan terhadap praktik penimbunan BBM merupakan salah satu langkah penting untuk menjaga distribusi solar

agar berjalan sesuai ketentuan dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan secara tidak semestinya.

Untuk diketahui, antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi BBM jenis solar di sejumlah SPBU di Aceh mulai menghilang sejak 19 Oktober 2026. Kondisi tersebut membuat masyarakat kini lebih mudah mendapatkan solar tanpa harus menghadapi antrean panjang seperti sebelumnya.

“Saya mengapresiasi Polda Aceh yang sudah bekerja untuk menangkap para pelaku penimbun solar di Aceh,” kata Nazaruddin Dek Gam, Senin, 26 Oktober 2026.

Dek Gam—sapaan Nazaruddin—berharap, langkah

tegas aparat kepolisian tersebut dapat terus dilakukan agar persoalan distribusi solar bersubsidi tidak kembali menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Menurutnya, ketersediaan BBM yang memadai di SPBU sangat penting bagi masyarakat, terutama para pengemudi angkutan, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat lain yang bergantung pada solar untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Saya berharap pengawasan terhadap penyaluran solar bersubsidi terus diperkuat, sehingga BBM yang diperuntukkan bagi masyarakat dapat diterima oleh pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” harapnya.

Selain penindakan hukum, pengawasan secara berkelanjutan

dinilai penting untuk mencegah praktik penimbunan maupun penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi. Dengan demikian, ketersediaan solar di SPBU dapat tetap terjaga dan masyarakat tidak kembali menghadapi kesulitan saat hendak mengisi bahan bakar.

Anggota Komisi 3 DPR RI itu menegaskan, upaya menjaga kelancaran distribusi BBM membutuhkan pengawasan yang konsisten serta kerja sama seluruh pihak terkait.

“Saya berharap kondisi SPBU di Aceh yang kini semakin lancar dapat terus dipertahankan demi mendukung aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah,” ujarnya.[]

ACEH

Cabang Tilawah Warnai Arena Utama MTQ ke-35 Aceh Besar

Oleh Redaksi · 26 Okt, 17.51 WIB



KOTA JANTHO - Rangkaian kegiatan cabang tilawah mewarnai pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-35 tingkat Kabupaten Aceh Besar di arena utama Lapangan Kemukiman Bung Cala, Kecamatan Kuta Baro, Senin (26/10/2026).

Kegiatan hari ini meliputi perlombaan golongan anak-anak, pengambilan maqra' golongan remaja, hingga penampilan golongan dewasa pada malam hari.

Kepala Dinas Syariat Islam (DSI) Kabupaten Aceh Besar, Rusdi, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai jadwal masing-masing golongan.

“Untuk agenda hari ini, peserta golongan anak-anak mengikuti perlombaan sejak pagi dan dilanjutkan kembali pada siang hingga sore hari. Setelah itu, kegiatan berlanjut dengan pengambilan maqra' golongan remaja, sedangkan penampilan golongan dewasa dijadwalkan pada malam hari,” ujar Rusdi.

Musabaqah tilawah golongan anak-anak berlangsung sejak pagi hingga menjelang siang dengan peserta bernomor TQ 116 hingga TQ 132. Perlombaan kemudian dilanjutkan pada siang hingga sore hari, termasuk setelah waktu Asar, dengan peserta bernomor TQ 133,

134, 135, 136, 137, 139, 141, 142, dan 143.

Secara keseluruhan, golongan anak-anak diikuti sebanyak 25 peserta.

Setelah rangkaian perlombaan golongan anak-anak, kegiatan dilanjutkan dengan pengambilan maqra' bagi 20 peserta tilawah golongan remaja.

Para peserta tersebut memiliki nomor TQ 201 hingga TQ 211 serta TQ 213 hingga TQ 221.

Sementara itu, pada malam hari, musabaqah tilawah golongan dewasa dijadwalkan diikuti tujuh peserta dengan nomor TQ 308 hingga TQ 314.

Rusdi berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan para peserta dapat mengikuti setiap tahapan perlombaan dengan baik serta menampilkan kemampuan terbaik mereka.

“Kami berharap seluruh rangkaian perlombaan berjalan lancar sesuai jadwal dan seluruh peserta dapat tampil maksimal,” harapnya.

Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan MTQ ke-35 Aceh Besar Tahun 2026 sekaligus memberikan kesempatan kepada para peserta dari berbagai golongan untuk menunjukkan kemampuan membaca Al-Qur'an sesuai kaidah dan ketentuan musabaqah.***

ACEH

Syech Muharram Minta Dewan Hakim MTQ Aceh Besar Jaga Objektivitas Penilaian

Oleh Redaksi · 25 Okt, 18.25 WIB

BANDA ACEH, KOTA JANTHO – Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris (Syech Muharram) meminta dewan hakim dan dewan pengawas Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXXV tingkat Kabupaten Aceh Besar menjalankan tugas secara profesional. Penilaian harus dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan proporsional agar peserta terbaik terpilih berdasarkan kemampuan masing-masing.

“Kepada dewan hakim dan dewan pengawas, saya menitipkan amanah besar ini. Laksanakan penilaian secara objektif, adil, transparan, dan proporsional sehingga menghasilkan peserta yang berkualitas dan berintegritas,” tegas Syech Muharram saat membuka MTQ XXXV di Lapangan Bung Cala, Kecamatan Kuta Baro, Sabtu (24/10/2026) malam.

Sebagai bagian dari rangkaian pembukaan, sebanyak 95 dewan hakim dilantik oleh Bupati Aceh Besar. Mereka bertugas melaku-

kan penilaian terhadap peserta yang berkompetisi dalam berbagai cabang perlombaan selama pelaksanaan MTQ pada 24–31 Oktober 2026.

Syech Muharram menekankan bahwa proses penilaian memiliki peran penting dalam menentukan peserta yang akan dipersiapkan untuk mewakili Aceh Besar pada MTQ tingkat provinsi hingga nasional. Karena itu, setiap keputusan harus didasarkan pada kemampuan peserta dan ketentuan perlombaan, bukan pertimbangan di luar kompetensi.

Ajang MTQ XXXV diikuti 665 peserta yang tergabung dalam 23 kafilah kecamatan. Mereka bersaing dalam cabang tilawah, qira'ah sab'ah, tartil, tahfiz, tafsir Al-Quran, fahmil Quran, syarhil Quran, khattil Quran, serta karya tulis ilmiah Al-Quran.

Bupati berharap pelaksanaan MTQ mampu menjaring qari, qariah, hafiz, dan hafizah berkualitas yang ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ADVERTORIAL



Selamat dan Sukses

ATAS PELANTIKAN DAN SERTIJAB

BRIGJEN TNI MAHESA FITRIADI, S.A.P., M.M.

Sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda



Oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat
JENDERAL TNI TANDYO BUDI REVITA

di Gedung AH Nasution,
Markas Besar TNI Angkatan Darat,
Jakarta Pusat,
pada hari Jumat, 16 Oktober 2026

Semoga dalam melaksanakan tugas
selalu mendapat rahmat dan petunjuk
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dan Terima Kasih Kepada
MAYJEN TNI JOKO HADI SUSILO, S.I.P.
Atas pengabdianya selama ini

Tertanda,
FADHIL ILYAS
Direktur Utama

Bank Aceh Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS

www.bankacehsyariah.co.id

ACEH

Pangdam IM Lantik Bintara TNI AD, Tekankan Disiplin dan Jiwa Keprajurititan

Oleh Redaksi · 26 Okt, 13.52 WIB



BANDA ACEH, BANDA ACEH — Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM), Brigadir Jenderal TNI Mahesa Fitriadi, S.A.P., M.M., menutup Pendidikan Pertama Bintara (Dikmaba) Infanteri TNI Angkatan Darat Gelombang III Tahun Anggaran 2026 di Rindam Iskandar Muda, Senin (26/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya disiplin dan jiwa keprajurititan bagi para Bintara yang baru dilantik.

Penutupan pendidikan itu menandai keberhasilan para prajurit siswa menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan dan resmi dilantik serta disumpah menjadi Bintara TNI AD dengan pangkat Sersan Dua (Serda). Mereka selanjutnya akan mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai bagian dari kekuatan pertahanan negara.

Dalam amanatnya, Pangdam Iskandar Muda menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh prajurit atas keberhasilan menyelesaikan pendidikan. Ia menegaskan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras, kedisiplinan, semangat, serta pengorbanan selama mengikuti pendidikan.

Menurut Pangdam, pendidikan yang telah ditempuh merupakan proses pembentukan karakter untuk mengubah sikap dan perilaku sipil menjadi prajurit TNI AD yang tangguh, berkarakter, serta memiliki jiwa nasionalisme dan militansi yang kuat, dengan senantiasa berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan menyelesaikan pendidikan dasar bukanlah akhir dari proses pembentukan seorang prajurit, melainkan awal perjalanan

pengabdian yang menuntut kesiapan fisik, mental, dan moral dalam menghadapi tantangan tugas ke depan.

Pangdam kemudian menyampaikan lima penekanan yang harus menjadi pedoman bagi seluruh Bintara yang baru dilantik.

Pertama, memelihara dan meningkatkan kedisiplinan dalam sikap maupun perilaku yang telah terbentuk selama pendidikan agar menjadi bagian dari kepribadian sehari-hari sebagai prajurit.

Kedua, tidak cepat berpuas diri atas pencapaian yang telah diraih serta senantiasa mempersiapkan kondisi fisik dan mental secara prima untuk mengikuti pendidikan lanjutan.

Ketiga, berpegang teguh pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI. Para prajurit juga diminta menaati hukum,

menjunjung tinggi etika pergaulan, serta menghindari segala bentuk perbuatan tercela yang dapat mencoreng nama baik TNI AD.

Keempat, mengutamakan faktor keamanan, baik personel maupun materiil, dalam setiap pelaksanaan kegiatan dan tugas.

Kelima, senantiasa berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan sebagai wujud keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pangdam berharap para Bintara yang baru dilantik mampu menerapkan nilai-nilai yang diperoleh selama pendidikan dalam setiap pelaksanaan tugas.

ACEH

Aceh Barat Percepat Program Cek Kesehatan Gratis

Oleh Aceh Barat · 26 Okt, 17.02 WIB



Sekda Aceh Barat, Dr. Ir. Kurdi, ST, MT, MH, membuka Rakor Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, FOTO/fist

MEULABOH — Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendorong percepatan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) setelah pelaksanaannya baru menjangkau 25.356 orang atau 11,91 persen dari jumlah penduduk hingga 13 Oktober 2026.

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Program CKG yang dibuka Sekretaris Daerah Aceh Barat, Dr. Ir. Kurdi, ST, MT, MH, mewakili bupati, di Aula Parkside Meuligoe Hotel, Senin (26/10/2026).

Kurdi mengatakan, CKG merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui deteksi dini faktor risiko dan penyakit. Karena itu, perlu langkah percepatan agar layanan tersebut menjangkau lebih banyak warga.

“Capaian ini menjadi dasar bagi kita untuk menyusun langkah percepatan yang lebih terarah. Kami ingin program ini semakin luas menjangkau masyarakat dan benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kesehatan masyarakat Aceh Barat,” ujarnya.

Ia meminta seluruh fasilitas pelayanan kesehatan tingkat per-

tama (FKTP), termasuk puskesmas, klinik, serta dokter dan bidan praktik mandiri, berperan aktif dalam pelaksanaan program.

Selain itu, koordinasi lintas sektor perlu diperkuat dengan melibatkan perangkat daerah, pemerintah kecamatan, dan pemerintah gampong. Edukasi kepada masyarakat juga harus ditingkatkan agar warga semakin memahami pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Kurdi turut meminta Dinas Kesehatan bersama seluruh FKTP mengevaluasi capaian, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta menyusun target dan langkah tindak lanjut yang terukur.

Menurutnya, keberhasilan CKG tidak hanya ditentukan oleh jumlah warga yang menjalani pemeriksaan, tetapi juga tindak lanjut hasil pemeriksaan melalui edukasi dan pelayanan kesehatan yang sesuai kebutuhan masyarakat.

Melalui rakor tersebut, Pemkab Aceh Barat berharap lahir rencana kerja konkret untuk mempercepat cakupan CKG sekaligus memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit secara berkelanjutan.

ACEH

Olahan Ungkot Leubim Antar Forikan Aceh Tamiang Raih Juara 1 Meuseuraya Rasa 2026

Oleh Hamdani · 25 Okt, 10.31 WIB

BANDA ACEH — Tim Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Kabupaten Aceh Tamiang meraih Juara 1 Lomba Masak Meuseuraya Rasa 2026 melalui inovasi kuliner berbahan ikan kambing-kambing atau yang dikenal masyarakat Aceh sebagai ungot leubim. Kompetisi tersebut berlangsung di Balee Meuseuraya Aceh (BMA), Banda Aceh, Sabtu (24/10/2026), dalam rangkaian Meuseuraya Festival 2026.

Tim Aceh Tamiang mengandalkan menu utama Rolade Kambing Dalica Aceh, yakni olahan ikan kambing-kambing yang dipadukan dengan bumbu rempah dan tumisan daun ubi segar sebagai isian rolade.

Menu tersebut disajikan bersama Nasi Minyak Khas Tamiang yang diolah dengan teknik dibakar, kemudian dilengkapi bumbu kari kaya rempah. Perpaduan bahan pangan lokal dan cita rasa khas daerah menjadi bagian dari kreativitas tim dalam menyajikan hidangan berbasis hasil perikanan.

Pemanfaatan ikan kambing-kambing dalam kreasi tersebut menjadi salah satu upaya memperkenalkan potensi komoditas perikanan lokal melalui sajian yang lebih variatif dan menarik. Ikan yang belum banyak dimanfaatkan dalam kreasi kuliner bernilai tambah itu diolah menjadi hidangan yang berpotensi dikenal lebih luas oleh masyarakat.

Selain mendorong kreativitas memasak, inovasi tersebut juga memperlihatkan peluang pengembangan produk kuliner berbasis hasil perikanan lokal. Pengolahan ikan menjadi menu bercita rasa khas diharapkan dapat memperluas pilihan konsumsi ikan sekaligus membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM kuliner.

Keberhasilan meraih Juara 1 menjadi capaian bagi Tim Forikan Aceh Tamiang dalam mempromosikan potensi kuliner daerah. Inovasi berbahan ungot leubim tersebut sekaligus menunjukkan bahwa komoditas ikan lokal dapat dikembangkan menjadi sajian kreatif dengan nilai tambah ekonomi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ACEH

Syech Muharram Buka MTQ XXXV Aceh Besar, 665 Peserta Bersaing di 9 Lokasi Lomba

Oleh Redaksi · 25 Okt, 10.01 WIB

BANDA ACEH, KOTA JANTHO — Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXXV tingkat Kabupaten Aceh Besar tahun 2026 dimulai. Bupati Aceh Besar H Muharram Idris (Syech Muharram), membuka secara resmi ajang tersebut di Lapangan Bung Cala, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, Sabtu (24/10/2026) malam.

Ajang yang akan berlangsung hingga 31 Oktober 2026 tersebut diikuti oleh 665 peserta dan bersaing di sembilan lokasi lomba serta tergabung dalam 23 kafilah kecamatan se-Aceh Besar, dengan tujuan menjaring qari, qariah, hafiz, dan hafizah terbaik untuk

mewakili Aceh Besar pada MTQ tingkat provinsi hingga nasional.

Pada kesempatan itu, Bupati Syech Muharram, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan pelaksanaan MTQ, terutama panitia, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Aceh Besar, Dinas Syariat Islam, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Pemerintah Kecamatan Kuta Baro selaku tuan rumah.

Bupati Aceh Besar mengakui persiapan menghadapi MTQ kali ini dihadapkan pada kendala cuaca hujan yang menyebabkan kondisi lapangan belum sepenuhnya siap. Namun, melalui kerja keras dan

koordinasi berbagai pihak, serta doa para peserta dan masyarakat, akhirnya area utama dapat digunakan untuk pembukaan.

“Saya mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja maksimal, sehingga pembukaan MTQ malam ini dapat terlaksana dengan baik. Persiapan menghadapi kegiatan ini tidak mudah karena hujan terus mengguyur dan kondisi lapangan sempat tergenang. Alhamdulillah, berkat kerja keras semua pihak, kita dapat melaksanakan pembukaan sesuai rencana,” ujar Syech Muharram.

Bupati Aceh Besar menegaskan, MTQ bukan sekadar perlombaan untuk meraih gelar juara, melainkan sarana membumikan Al-

Quran, memperkuat syiar Islam, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta menumbuhkan kecintaan masyarakat, khususnya generasi muda terhadap kitab suci umat Islam.

Menurutnya, nilai-nilai Al-Quran harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dibaca dengan lantunan yang indah, tetapi juga dipahami, dihayati, dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat.

“Kita ingin nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Al-Quran benar-benar tertanam dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ACEH

Wagub Aceh Hadiri Maulid Nabi dan Doa Bersama Mengenang Setahun Bencana di Gayo

Oleh Redaksi · 26 Okt, 16.49 WIB



BANDA ACEH, ACEH TENGAH — Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, H. Fadhlullah, menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah yang dirangkai dengan doa bersama untuk keselamatan masyarakat serta mengenang satu tahun bencana banjir dan longsor yang melanda dataran tinggi Gayo. Kegiatan tersebut berlangsung khidmat di Masjid Quba, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Senin (26/10/2026).

Fadhlullah, yang akrab disapa Dek Fadh, hadir didampingi Direktur Intelkam Polda Aceh dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh. Turut hadir Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, Wakil Bupati Aceh Tengah, jaja-

ran Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forko-pimda).

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi momentum bagi masyarakat untuk memperkuat keimanan, mempererat ukhuwah Islamiyah, dan meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, doa bersama digelar sebagai ikhtiar spiritual untuk memohon perlindungan Allah SWT, keselamatan bagi masyarakat Aceh, serta kekuatan bagi warga yang terdampak bencana banjir dan longsor di dataran tinggi Gayo.

Dalam sambutannya, Fadhlullah mengatakan peringatan Maulid

Nabi dan doa bersama memiliki makna penting untuk memperkuat kebersamaan, kepedulian sosial, serta semangat masyarakat dalam menghadapi berbagai ujian dan musibah.

“Melalui momentum Maulid Nabi Muhammad SAW ini, mari kita memperkuat keimanan, menjaga persatuan, dan terus menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Kita juga berdoa agar Allah SWT senantiasa melindungi masyarakat Aceh, memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana, serta menjauhkan daerah kita dari segala musibah,” ujar Dek Fadh.

Ia juga mengajak masyarakat menjadikan peringatan satu tahun bencana banjir dan longsor di

dataran tinggi Gayo sebagai momentum untuk memperkuat solidaritas dan kebersamaan.

Menurutnya, semangat gotong royong dan kepedulian sosial perlu terus dijaga agar masyarakat dapat bangkit bersama serta menghadapi berbagai tantangan ke depan.

Pemerintah Aceh turut mendoakan agar masyarakat terdampak bencana diberikan ketabahan, kekuatan, dan kemudahan dalam menjalani proses pemulihan.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H dan doa bersama tersebut diikuti masyarakat serta jamaah yang memadati Masjid Quba, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah.***

ACEH

Pj Sekda Aceh Pimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana, Antisipasi Puncak Musim Hujan

Oleh Redaksi · 26 Okt, 15.34 WIB



BANDA ACEH, BANDA ACEH – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, memimpin apel kesiapsiagaan pengurangan risiko bencana dan gelar peralatan di halaman gudang Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Senin (26/10/2026).

Apel tersebut diikuti kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) serta personel dari Basarnas, Dinas Perhubungan Aceh, PMI, Tagana, BPBA, Dinas Sosial, BMKG, Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan Dinas PUPR.

Dalam arahannya, Taufik meminta seluruh unsur terkait meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, terutama menjelang puncak musim hujan pada November 2026.

Berdasarkan prakiraan BMKG, intensitas hujan diperkirakan meningkat pada 10 Zona Musim (ZOM) atau 62,5 persen wilayah ZOM di Aceh pada November, dibandingkan Oktober yang tercatat hanya pada satu ZOM atau 6,25 persen.

“Jangan menunggu bencana terjadi untuk bertindak, karena keselamatan masyarakat adalah prioritas utama,” tegas Taufik.

Ia meminta pemerintah kabupaten/kota bersama instansi terkait memastikan kesiapan personel, peralatan, dan logistik, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta menempatkan sumber daya di lokasi rawan bencana.

Taufik juga menekankan pentingnya pembersihan drainase dan alur sungai, pemantauan cuaca, penyebaran peringatan dini, serta pengaktifan posko dan penyusunan rencana kontingensi di setiap kabupaten/kota.

Menurutnya, kesiapsiagaan harus menjadi perhatian serius karena proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana masih berlangsung. Sejumlah warga masih tinggal di hunian sementara, sementara beberapa akses jalan dan jembatan masih rawan dilalui.

Ia meminta seluruh jajaran melakukan evaluasi dan pelaporan berkala agar setiap kendala dapat segera ditangani, sekaligus memastikan kebutuhan dasar dan keselamatan masyarakat, terutama kelompok rentan, tetap menjadi prioritas.

Kegiatan tersebut mengusung tema “Siaga Bersama, Tangguh Menghadapi Bencana Hidrometeorologi demi Aceh yang Aman dan Tangguh.”[]

SPORT

Cuaca Buruk, Balapan Utama MotoGP Australia 2026 Resmi Dibatalkan

Oleh Redaksi · 25 Okt, 12.20 WIB

BANDA ACEH, PHILLIP ISLAND — Balapan utama MotoGP Australia 2026 di Sirkuit Phillip Island, Minggu (25/10/2026), resmi dibatalkan akibat cuaca buruk yang menyebabkan jarak pandang terbatas dan mengganggu operasional helikopter medis.

Keputusan tersebut diambil setelah penyelenggara beberapa kali menunda jadwal balapan dengan harapan kondisi cuaca membaik. Namun, situasi di lintasan tetap tidak memenuhi persyaratan keselamatan untuk menggelar perlombaan.

Sebelum pembatalan kelas utama diumumkan, penyelenggara terlebih dahulu membatalkan balapan Moto3 dan Moto2. Sesi pemanasan atau warm-up MotoGP juga ditiadakan.

Dalam pernyataan resminya, MotoGP menjelaskan bahwa terbatasnya jarak pandang berdampak pada operasional helikopter medis di ajang Red Bull Grand Prix of Australia.

“Karena jarak pandang terbatas yang memengaruhi operasional helikopter medis di Red Bull Grand Prix of Australia, balapan Grand Prix MotoGP dibatalkan,” demikian pernyataan MotoGP.

Helikopter medis merupakan bagian penting dari prosedur keselamatan dalam balapan. Kendaraan tersebut harus dapat beroperasi untuk mendukung penanganan darurat dan evakuasi pebalap ke rumah sakit apabila terjadi kecelakaan.

Sebelum keputusan akhir diambil, jadwal aktivitas lintasan di Phillip Island mengalami beberapa kali perubahan akibat kondisi cuaca yang tidak mendukung.

Sesi pemanasan MotoGP yang semula dijadwalkan berlangsung pada pagi hari ditunda. Penyelenggara sempat berharap aktivitas lintasan dapat dimulai sekitar pukul 11.00 waktu setempat.

Namun, jarak pandang yang belum membaik membuat jadwal kembali berubah. Aktivitas lintasan kemudian tidak diizinkan ber-

langsung sebelum pukul 13.00 waktu setempat.

Penundaan kembali dilakukan karena kondisi belum memungkinkan helikopter medis beroperasi dengan aman. Penyelenggara selanjutnya menetapkan bahwa aktivitas lintasan tidak akan dimulai sebelum pukul 15.00 waktu setempat.

Dalam pembaruan berikutnya, pembukaan pit lane untuk balapan utama MotoGP sempat dijadwalkan pukul 16.00 waktu setempat atau pukul 12.00 WIB. Akan tetapi, jadwal tersebut masih bergantung pada perkembangan cuaca.

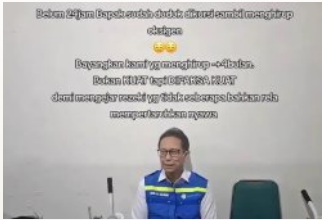
Setelah serangkaian penundaan, penyelenggara akhirnya memutuskan membatalkan balapan karena kondisi keselamatan tidak memungkinkan untuk dipenuhi.

Pembatalan balapan Moto3 dan Moto2 juga berdampak pada dua pebalap Indonesia yang dijadwalkan tampil di Phillip Island.

NASIONAL

Pernah Minta Warga Adaptasi dengan Karhutla, Menkes Kini Terekam Pakai Oksigen

Oleh Redaksi · 25 Okt, 10.44 WIB



BANDA ACEH -Pernah meminta warga beradaptasi dengan karhutla, Menkes Budi Gunadi Sadikin kini jadi sorotan setelah terlihat memakai oksigen saat kunjungan ke Kalteng.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah kembali menjadi sorotan.

Kali ini, perhatian publik tertuju pada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang terlihat menggunakan selang oksigen saat mengunjungi Rumah Oksigen MDMC PMW Kalteng.

Momen tersebut viral di media sosial dan memancing komentar warganet yang membandingkannya dengan kondisi warga yang ...

ACEH

Bupati Aceh Besar: MTQ Bukan Sekadar Lomba, tetapi Membumikan Nilai Al-Qur'an

Oleh Redaksi · 25 Okt, 13.14 WIB

BANDA ACEH, KOTA JANTHO – Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris (Syech Muharram) menegaskan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tidak boleh berhenti sebagai ajang perlombaan untuk meraih juara. Lebih dari itu, MTQ harus menjadi sarana membumikan nilai-nilai Al-Quran sekaligus membentuk generasi yang memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

“Kita ingin nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Al-Quran benar-benar tertanam dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran tidak hanya dibaca dengan suara yang indah, tetapi juga harus dipahami, dihayati, dan diamalkan demi mewujudkan Aceh Besar yang bertakwa, maju, dan bermartabat,” kata Syech Muharram saat membuka MTQ XXXV tingkat Kabupaten Aceh Besar di Lapangan Bung Cala, Kecamatan Kuta Baro, Sabtu (24/10/2026) malam.

Menurut Syech Muharram, MTQ memiliki peran penting dalam memperkuat syiar Islam, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap kitab suci umat Islam. Nilai-nilai tersebut, terutama, perlu ditanamkan kepada generasi muda sebagai bekal membangun kehidupan masyarakat yang berlandaskan ajaran Al-Quran.

Ia berharap penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk meningkatkan semangat masyarakat dalam mempelajari Al-Quran, tidak hanya dari sisi kemampuan membaca dan menghafal, tetapi juga dalam memahami makna serta menerapkan kandungannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Kepada seluruh peserta, Syech Muharram berpesan agar mengikuti setiap cabang perlombaan dengan penuh percaya diri, menjunjung tinggi kejujuran, menjaga kesehatan, dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperbaiki diri.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ACEH

Tiga Bulan Menjabat, Kapolda Aceh Hadirkan Harapan Baru dalam Penataan BBM Subsidi

Oleh Redaksi · 26 Okt, 09.16 WIB



BANDA ACEH, BANDA ACEH — Membaiknya ketersediaan solar bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sepanjang jalur barat selatan Aceh hingga berbagai wilayah lainnya merupakan perkembangan yang patut diapresiasi. Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Nasrul Zaman, menilai kondisi tersebut menjadi harapan baru dalam penataan distribusi BBM bersubsidi di Aceh, di tengah upaya pengawasan yang perlu terus diperkuat.

Menurut Nasrul Zaman, perjalanan menggunakan mobil diesel mengelilingi Aceh kini terasa lebih tenang karena masyarakat mendapati solar tersedia dalam jumlah yang relatif mencukupi di SPBU sepanjang perjalanan.

Ia menilai perubahan ini menjadi catatan positif bagi Kapolda

Aceh yang baru sekitar tiga bulan menjabat. Di tengah persoalan distribusi BBM bersubsidi yang selama ini meresahkan masyarakat, kondisi tersebut memberikan harapan bahwa penataan dan pengawasan yang serius dapat menghadirkan perubahan nyata.

Bagi rakyat, keberhasilan pemimpin tidak diukur dari banyaknya pernyataan atau seremoni, melainkan dari persoalan yang berhasil diatasi. Ketika pengendara tidak lagi dihantui kecemasan kehabisan solar di tengah perjalanan, manfaat kepemimpinan dapat dirasakan secara langsung.

“Pemimpin yang bekerja dengan benar akan menghadirkan ketenangan, membangun kepercayaan, dan membuat rakyat merasakan

kehadiran negara,” demikian pandangan Nasrul Zaman.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa apresiasi tersebut bukan pujian tanpa batas. Membaiknya pasokan harus terus dijaga dan dibuktikan secara berkelanjutan di seluruh Aceh. Pengawasan distribusi, ketepatan sasaran penerima subsidi, serta keterbukaan terhadap pengaduan masyarakat tetap diperlukan agar kondisi positif ini tidak sekadar menjadi keberhasilan sesaat.

Tantangan berikutnya, menurut Nasrul Zaman, adalah memastikan tidak ada ruang bagi mafia BBM untuk memainkan distribusi, menimbun pasokan, atau menyalahgunakan subsidi yang seharusnya menjadi hak masyarakat. Jika ditemukan pelanggaran, penegakan hukum harus dilakukan secara

tegas, profesional, dan tanpa pandang bulu berdasarkan bukti yang kuat.

Ia juga mendoakan agar Kapolda Aceh senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan keteguhan dalam menjaga amanah serta menghadapi praktik mafia BBM di Aceh.

Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan pemimpin yang sekadar dipuji, tetapi pemimpin yang konsisten membuktikan keberpihakannya kepada rakyat.

“Apresiasi diberikan atas perubahan yang dirasakan hari ini, sedangkan dukungan dan pengawasan publik diperlukan untuk memastikan perubahan itu tetap bertahan esok hari,” tutupnya.[]

EKONOMI

CAEXPO: Perusahaan Indonesia Ubah Peluang Tiongkok Jadi Profit Nyata

Oleh Redaksi · 25 Okt, 00.28 WIB

TIONGKOK - Pada 17 September, aroma kopi khas Indonesia berpadu dengan aroma minyak sawit yang tercium hingga ke lorong-lorong pameran di Nanning International Convention and Exhibition Center.

Hari itu menandai pembukaan China-ASEAN Expo (CAEXPO) ke-23. Tahun ini, pameran menempati area seluas 170.000 meter persegi, meningkat sekitar 6% dibandingkan tahun sebelumnya.

Lebih dari 3.400 perusahaan berpartisipasi dalam pameran yang diselenggarakan di tiga lokasi, yakni Nanning International Convention and Exhibition Center, Nanning ASEAN (NAN A) Community, dan Guilin International Convention and Exhibition Center.

Sekitar 50 kegiatan perdagangan dan ekonomi juga dijadwalkan berlangsung selama pameran.

Mengusung tema “Berbagi Peluang 3.0, Mewujudkan Kehidupan yang Lebih Baik Bersama”, acara ini sekilas terdengar seperti agenda kerja sama ekonomi pada umumnya. Namun, suasana di paviliun Indonesia menunjukkan bahwa tema tersebut memiliki makna bisnis yang konkret.

Tahun ini, sebanyak 78 perusahaan Indonesia mengikuti CAEXPO, menjadikan Indonesia salah satu peserta dengan kehadiran terbesar di antara negara-negara ASEAN. Dengan luas paviliun hampir 2.000 meter persegi, Indonesia berada di kelompok teratas bersama Malaysia dan Thailand dalam hal skala partisipasi.

Sejumlah perusahaan besar turut hadir, termasuk Pertamina, perusahaan energi Indonesia yang masuk dalam daftar Fortune Global 500; Golden Peak Group, salah satu pemain utama di industrinya; serta PT Wahana Telekomunikasi yang bergerak di bidang komunikasi satelit.

Perusahaan pengolahan produk turunan kelapa sawit, eksportir furnitur, serta produsen makanan dan minuman juga ambil bagian. Kehadiran mereka mencerminkan semakin beragamnya sektor bisnis Indonesia, mulai dari komoditas tradisional hingga kecerdasan buatan (AI) dan ekonomi hijau.

Lantas, mengapa perusahaan Indonesia begitu antusias mengikuti pameran ini?

Jawabannya cukup sederhana. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar Indonesia selama 13 tahun berturut-turut. Pada 2025, nilai perdagangan bilateral kedua negara telah melampaui US\$100 miliar.

Minyak sawit, bijih nikel, kopi, dan karet dari Indonesia, serta kendaraan listrik, modul fotovoltaik, dan mesin konstruksi dari Tiongkok, telah menjadi bagian dari hubungan rantai ...

LINGKUNGAN

Warga Diminta Waspada, BMKG: Hujan Lebat Berpotensi Guyur Aceh hingga 26 Oktober

Oleh Redaksi · 25 Okt, 01.07 WIB

BANDA ACEH - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi cuaca ekstrem di Provinsi Aceh pada 24–26 Oktober 2026.

Hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi di sejumlah wilayah dan dapat memicu bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, serta pohon tumbang.

Peringatan tersebut disampaikan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, Cucu Kusmayancu, melalui siaran pers yang diterbitkan pada Sabtu (24/10/2026).

BMKG mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah antisipasi selama periode tersebut.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ACEH

Selama 14 Hari, Polres Aceh Barat Gencarkan Operasi Patuh

Oleh Aceh Barat · 26 Okt, 18.05 WIB



Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Seulawah 2026, FOTO/ist

MEULABOH– Polres Aceh Barat menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Seulawah 2026 di halaman Mapolres Aceh Barat, Senin (26/10/26). Operasi ini berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026, untuk meningkatkan kepatuhan dan keselamatan berlalu lintas di Aceh.

Apel dipimpin Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto, S.H., S.I.K., yang menegaskan bahwa ketertiban berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama antara kepolisian dan masyarakat.

Menurutnya, Operasi Patuh Seulawah tidak hanya berfokus pada penindakan pelanggaran, tetapi juga mengedepankan langkah preventif, edukatif, dan persuasif guna membangun budaya tertib berlalu lintas serta menekan risiko kecelakaan.

Kapolres meminta seluruh personel menjalankan tugas secara

profesional, humanis, transparan, dan akuntabel. Sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, serta instansi terkait juga diperkuat untuk mendukung kelancaran operasi dan meningkatkan edukasi keselamatan kepada masyarakat.

Apel tersebut dihadiri jajaran Polres Aceh Barat, perwakilan Denpom IM/2 Meulaboh, Kodim 0105/Aceh Barat, Dinas Perhubungan, Jasa Raharja, Satpol PP/WH, serta anggota Pramuka. Kegiatan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesiapan personel sebelum bertugas.

Melalui operasi ini, Polres Aceh Barat berharap angka pelanggaran dan risiko kecelakaan lalu lintas dapat ditekan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kepatuhan terhadap aturan merupakan bagian penting dalam menjaga keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.[]

Editor : Biro Meulaboh.

INTERNASIONAL

Trump Ancam Serang Iran Hari Ini, kecuali...

Oleh Redaksi · 25 Okt, 10.33 WIB



BANDA ACEH - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melontarkan ancaman baru terhadap Iran. Dia mengancam akan menyerang Iran pada Minggu (25/10/2026) waktu AS jika negara itu tak mau mencapai kesepakatan.

“Kami sedang memikirkannya, dan mungkin besok,” kata Trump, kepada wartawan, Sabtu (24/10/2026), saat ditanya seberapa jauh dia mempertimbangkan serangan tersebut, seperti dikutip dari Reuters.

“Apa Anda benar-benar berpikir saya akan memberi tahu Anda jika saya melakukannya?” ujarnya, lagi.

Trump melanjutkan, Iran masih bisa menghindari serangan militer lebih lanjut jika mau mencapai kesepakatan dengan AS.

“Mereka ingin membuat kesepakatan, tapi masalahnya adalah apakah mereka akan menepati kesepakatan itu?” tuturnya.

Trump mengulangi dalih perangnya terhadap Iran, serangan AS bertujuan mencegah negara tersebut mengembangkan senjata nuklir. Operasi AS sebelumnya, lanjut dia, dinilai belum cukup untuk menjamin bahwa program nuklir Iran benar-benar berhenti, meski menggunakan pesawat pengebom B-2.

“Saya harus membuatnya permanen. Itulah satu-satunya alasan saya melakukannya,” ujarnya.

Trump juga mengklaim pengiriman minyak melalui Selat Hormuz meningkat dibandingkan sebelum perang dimulai, namun tak memberikan angka pasti.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ACEH

Wagub Aceh Serahkan Buffer Stock Bencana Rp4,85 Miliar untuk Bener Meriah dan Aceh Tengah

Oleh Redaksi · 26 Okt, 10.47 WIB



BANDA ACEH, ACEH TENGAH — Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, H. Fadhlullah, S.E., atau yang akrab disapa Dek Fadh, menyerahkan bantuan Pemerintah Aceh berupa buffer stock penanggulangan bencana untuk Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah, Senin (26/10/2026).

Bantuan tersebut masing-masing senilai Rp4.491.425.333 untuk Kabupaten Bener Meriah dan Rp366.049.584 untuk Kabupaten Aceh Tengah. Dengan demikian, total bantuan yang diserahkan mencapai Rp4.857.474.917.

Penyerahan bantuan di Kabupaten Bener Meriah berlangsung di halaman Kantor Bupati Bener Meriah dan diterima langsung oleh Wakil Bupati Bener Meriah, Ir. H. Armia.

Sementara itu, penyerahan bantuan di Kabupaten Aceh Tengah berlangsung di Pendopo Kabupaten Aceh Tengah dan diterima

langsung oleh Bupati Aceh Tengah, Drs. Haili Yoga, M.Si., beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto

Dalam kegiatan tersebut, Dek Fadh didampingi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Partai Aceh, Yahdi Hasan Ramud, S.I.Kom.; Direktur Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) Polda Aceh, Kombes Pol. Said Anna Fauza, S.I.K., M.M., M.H.; Kepala Dinas Sosial Aceh, Budi Afrizal, S.KM., M.KM.; serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Aceh, Akkar Arafat.

Dek Fadh berharap bantuan yang diserahkan Pemerintah Aceh tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam menghadapi situasi bencana.

“Semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan membantu pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kesiapsiagaan serta penanganan bencana. Kita berharap dengan adanya bantuan ini, kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana dapat terpenuhi dengan baik,” ujar Dek Fadh.

Penyerahan bantuan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Aceh dalam memperkuat kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi bencana. Bantuan buffer stock tersebut diharapkan dapat mendukung penanganan masyarakat yang terdampak bencana.

Pemerintah Aceh terus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam upaya penanggulangan bencana guna memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat Aceh.***

ACEH

Hadiri Verifikasi Lapangan Evaluasi PUG, Pj Sekda Aceh Tekankan Pembangunan Responsif Gender

Oleh Redaksi · 26 Okt, 16.04 WIB



BANDA ACEH, BANDA ACEH – Pejabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, menghadiri Acara Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2025 di Ruang Potensi Daerah I Sekretariat Daerah Aceh, Senin (26/10).

Dalam sambutannya, Taufik menyampaikan bahwa verifikasi lapangan tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki kebijakan pembangunan agar semakin responsif gender, inklusif, dan berkeadilan.

“Pemerintah Aceh berkomitmen memastikan pembangunan memberikan kesempatan yang setara

bagi laki-laki maupun perempuan untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat pembangunan,” ujarnya.

Sekda menyebutkan, komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui integrasi perspektif gender dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Ia juga menekankan agar seluruh SKPA dapat berperan aktif dalam memastikan kebijakan dan program pembangunan yang menjawab kebutuhan masyarakat secara merata.

Adapun Indeks Pembangunan Gender (IPG) Aceh pada 2025 mencapai 93,11, naik 0,47 poin

dari tahun sebelumnya dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 92,69. Capaian ini menjadi dorongan bagi Pemerintah Aceh untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan yang setara dan berkeadilan.

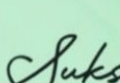
Melalui verifikasi lapangan tersebut, Pemerintah Aceh berharap hasil evaluasi dan rekomendasi yang diberikan dapat menjadi bahan perbaikan dalam memperkuat pelaksanaan PUG, sehingga pembangunan yang inklusif dan berkeadilan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.***

659 Atlet Panahan Berkompetisi, Irwansyah Ajak Generasi Muda Jauhi Narkoba Lewat Olahraga

Kompetisi ini diselenggarakan Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dispora bekerja sama dengan Mujahid Archery Club (MAC). Sebanyak 659 atlet yang mewakili 10 pengurus cabang (pengcab) dan 66 klub turut ambil bagian dalam kejuaraan tersebut ***



Bank Aceh



Selamat dan Sukses

ATAS PELANTIKAN DAN SERTIJAB

BRIGJEN TNI MAHESA FITRIADI, S.A.P., M.M.

Sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda



Oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat
JENDERAL TNI TANDYO BUDI REVITA

di Gedung AH Nasution,
Markas Besar TNI Angkatan Darat,
Jakarta Pusat,
pada hari Jumat, 16 Oktober 2026

Semoga dalam melaksanakan tugas
selalu mendapat rahmat dan petunjuk
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dan Terima Kasih Kepada
MAYJEN TNI JOKO HADI SUSILO, S.I.P.
Atas pengabdiannya selama ini

Tertanda,

FADHIL ILYAS
Direktur Utama

www.bankaceh.co.id

Bank Aceh Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS

SPORT

Jadwal MotoGP Malaysia 2026: Marquez Bidik Pelampiasan, Veda Ega Incar Kebangkitan

Oleh Redaksi · 26 Okt, 18.51 WIB



BANDA ACEH, SEPANG — Marc Marquez berpeluang kembali memburu kemenangan saat MotoGP Malaysia 2026 digelar di Sirkuit Sepang, 30 Oktober hingga 1 November. Pembalap yang berstatus juara bertahan itu datang dengan motivasi tinggi setelah gagal berlaga pada MotoGP Australia akibat cuaca buruk.

MotoGP Malaysia menjadi seri penting dalam fase akhir persaingan musim 2026. Hasil balapan di Sepang berpotensi memengaruhi perebutan gelar juara, sehingga setiap poin menjadi krusial bagi para pembalap.

Sebelumnya, seri Australia di Sirkuit Phillip Island terpaksa dibatalkan karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan balapan berlangsung. Situasi tersebut membuat Marquez kehilangan kesempatan untuk memaksimalkan peluang setelah menunjukkan

kepercayaan diri tinggi menjelang akhir pekan balap.

Kini, pembalap ber juluk The Baby Alien itu mengalihkan perhatian ke Sepang. Marquez diperkirakan berusaha menjadikan seri Malaysia sebagai momentum untuk meraih hasil maksimal setelah kekecewaan di Australia.

Selain Marquez, pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, juga akan kembali berjuang di kelas Moto3 bersama Honda Team Asia. Veda sebelumnya berhasil merebut pole position pada Moto3 Australia, tetapi gagal tampil dalam balapan karena cuaca buruk di Phillip Island.

Moto3 Malaysia pun menjadi kesempatan bagi Veda untuk kembali menunjukkan potensinya setelah pencapaian tersebut tak berujung pada kesempatan berlaga di Australia.

Jadwal Lengkap MotoGP Malaysia 2026

Rangkaian MotoGP Malaysia dimulai pada Jumat (30/10/2026) dengan sesi latihan bebas dan latihan utama. Kualifikasi serta sprint race MotoGP akan berlangsung pada Sabtu (31/10/2026), sebelum balapan utama digelar pada Minggu (1/11/2026).

Berikut jadwal lengkap MotoGP Malaysia 2026 dalam Waktu Indonesia Barat (WIB).

Jumat, 30 Oktober 2026

- 08.00–08.35 WIB: FP1 Moto3
- 08.50–09.30 WIB: FP1 Moto2
- 09.45–10.30 WIB: FP1 MotoGP
- 12.15–12.50 WIB: Practice Moto3
- 13.05–13.45 WIB: Practice Moto2
- 14.00–15.00 WIB: Practice MotoGP

Sabtu, 31 Oktober 2026

- 07.40–08.10 WIB: FP2 Moto3

- 08.25–08.55 WIB: FP2 Moto2
 - 09.10–09.40 WIB: FP2 MotoGP
 - 09.50–10.05 WIB: Kualifikasi 1 MotoGP
 - 10.15–10.30 WIB: Kualifikasi 2 MotoGP
 - 11.45–12.00 WIB: Kualifikasi 1 Moto3
 - 12.10–12.25 WIB: Kualifikasi 2 Moto3
 - 12.40–12.55 WIB: Kualifikasi 1 Moto2
 - 13.05–13.20 WIB: Kualifikasi 2 Moto2
 - 14.00 WIB: Sprint race MotoGP Malaysia (10 lap)
- Minggu, 1 November 2026
- 09.40–09.50 WIB: Warm up
 - 10.00–10.40 WIB: Parade pembalap
 - 11.00 WIB: Balapan Moto3
 - 12.15 WIB: Balapan Moto2
 - 14.00 WIB: Balapan utama MotoGP Malaysia (20 lap)



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

SPORT

Kronologi Atlet Selam Syabilla Rizkia Meninggal di Porprov Jateng, Sempat Lambaikan Tangan 2 Kali

Oleh Redaksi · 26 Okt, 14.09 WIB



BANDA ACEH - Atlet selam Jepara Syabilla Rizkia meninggal saat Porprov Jateng 2026. Ia sempat melambaikan tangan 200 meter dari finis sebelum tragedi terjadi.

Tragedi terjadi di arena Porprov Jawa Tengah XVII.

Syabilla Rizkia Putri Raharja, atlet selam berusia 22 tahun asal Kabupaten Jepara, meninggal dunia setelah mengalami insiden saat mengikuti perlombaan selam laut sejauh 3 kilometer di Pantai Awann Costa, Minggu (25/10/2026).

Peristiwa ini menjadi sorotan setelah muncul informasi bahwa Syabilla sempat dua kali melambaikan tangan ketika berada sekitar 200 meter dari garis finis.

Syabilla bukan atlet tanpa prestasi. Sebelum mengikuti nomor selam laut, ia telah mengantongi dua medali emas dari nomor selam kolam.

Namun, pertandingan di perairan terbuka itu berakhir tragis.

Kronologi insiden bermula ketika Syabilla mengikuti nomor selam laut 3 kilometer dalam ajang olahraga tingkat Provinsi Jawa Tengah tersebut.

Saat perlombaan mendekati akhir, posisinya dilaporkan berada sekitar 200 meter dari garis finis.

Pada jarak tersebut, Syabilla sempat melambaikan tangan sebanyak dua kali.

Tim penyelamat yang mengetahui situasi itu kemudian mendekat dan menawarkan pertolongan.

Namun, berdasarkan keterangan Ketua KONI Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiattmoko, Syabilla sempat menolak bantuan dan memilih meneruskan perlombaan.

Situasi kemudian memburuk, Syabilla tenggelam dan harus mendapatkan pertolongan.

Nyawanya tidak tertolong setelah mengalami gagal napas.

Belum ada keterangan terperinci mengenai kondisi fisik Syabilla sebelum insiden, alasan ia menolak bantuan, maupun urutan penanganan medis secara lengkap.

Kepergian Syabilla menjadi bahan evaluasi serius bagi KONI Jawa Tengah.

Salah satu hal yang mendapat perhatian adalah cara tim penyelamat merespons atlet yang menunjukkan tanda-tanda kesulitan selama pertandingan.

Sujarwanto menegaskan bahwa keselamatan harus berada di atas kepentingan menyelesaikan lomba.

Ia meminta tim penyelamat segera mengambil tindakan apabila atlet menyatakan menyerah, tanpa menunggu konfirmasi berulang.

“Ke depan, tim rescue sudah kami minta apabila ada atlet yang menyatakan menyerah pada kesempatan pertama, langsung diambil tindakan. Keselamatan nomor satu,” kata Sujarwanto dalam keterangannya.

Evaluasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan insiden yang menimpa Syabilla.

KONI Jawa Tengah juga mencatat dua atlet lain mengalami masalah kesehatan ketika mengikuti pertandingan di perairan terbuka.

Kondisi ini mendorong penyelenggara memperkuat pengamanan pada sisa pertandingan Porprov Jateng XVII.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



SPORT

Atlet Selam Jepara Peraih 2 Emas Meninggal usai Tenggelam di Ajang Porprov Jateng 2026

Oleh Redaksi · 26 Okt, 09.55 WIB



Atlet selam laut andalan Kabupaten Jepara, Syabilla Rizkia Putri Rahaja, meninggal dunia setelah mengalami insiden tenggelam saat berlaga di perairan Awan Costa, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Minggu (25/10/2026). FOTO/Net.

BANDA ACEH – Kabar duka menyelimuti ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Tengah 2026.

Atlet selam laut andalan Kabupaten Jepara, Syabilla Rizkia Putri Rahaja, meninggal dunia setelah mengalami insiden tenggelam saat berlaga di perairan Awan Costa, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Minggu (25/10/2026).

Sebelum insiden nahas tersebut terjadi, mahasiswi berprestasi ini telah berhasil menyumbangkan dua medali emas bagi Kabupaten Jepara dari cabang olahraga (cabor) selam nomor kolam putri 100 meter dan 200 meter bifins.

Diperoleh informasi, kronologi insiden bermula saat Syabilla tampil pada nomor 3.000 meter selam laut.

Ketika memasuki putaran kedua, tim pendamping dari

perahu karet sempat melihat Syabilla melambatkan tangan.

Namun, saat tim mendekat untuk memastikan kondisinya, almarhumah kembali melanjutkan aktivitas menyelamnya.

Sesaat kemudian, korban kembali melambatkan tangan untuk kedua kalinya. Tim pendamping kembali menghampiri, tetapi korban lagi-lagi meneruskan renangnya.

Nahas, ketika perlombaan mendekati garis finis, tim rescue yang bersiap menyambut justru kehilangan jejak keberadaan Syabilla di permukaan air.

Petugas penyelamat langsung melakukan pencarian cepat dan penyelaman darurat di sekitar lokasi.

Setelah berhasil dievakuasi, petugas menyiramkan pertolongan pertama dan membawa Syabilla ke

Rumah Sakit Keluarga Sehat Semarang.

Namun, upaya medis intensif tak mampu menyelamatkan nyawanya.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, jajaran KONI Jawa Tengah, serta Penjabat Bupati Jepara menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas berpulangnya atlet muda berbakat tersebut.

Ketua KONI Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiarmoko, mengatakan, segera menggelar evaluasi menyeluruh terkait insiden maut di cabor selam laut ini.

"KONI Jateng akan melakukan evaluasi total. Evaluasi ini mencakup kesiapan standar perlengkapan keselamatan, pola pengawasan atlet di lintasan laut, hingga penambahan personel tim penyelamat (rescue) selama perlombaan

berlangsung," kata Sujarwanto Dwiarmoko.

Syabilla Mahasiswi UGM Berprestasi

Selain mengukir prestasi gemilang di panggung olahraga nasional dan daerah, Syabilla Rizkia Putri Rahaja tercatat sebagai mahasiswi aktif Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM) angkatan 2023.

Kecintaannya pada olahraga air telah terbina sejak duduk di bangku Sekolah Dasar (SD). Dedikasi dan bakatnya terus berkembang pesat hingga almarhumah aktif sebagai anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Renang UGM dan menjadi andalan kontingen Kabupaten Jepara.

SPORT

Real Madrid Hajar Barcelona 2-1 di Camp Nou

Oleh Redaksi · 26 Okt, 06.29 WIB



BANDA ACEH, BARCELONA — Kylian Mbappe menjadi penentu kemenangan Real Madrid atas Barcelona dalam laga El Clasico pekan ke-10 LaLiga 2026/2027. Bermain di Camp Nou, Senin (26/10/2026) dini hari WIB, Madrid menundukkan tuan rumah dengan skor 2-1.

Mbappe mencetak dua gol untuk membawa Los Blancos meraih tiga poin penting dalam persaingan papan atas Liga Spanyol. Barcelona sempat menyamakan kedudukan melalui Raphinha pada babak kedua, tetapi gol Mbappe menjelang akhir pertandingan memastikan kemenangan tim tamu.

Hasil tersebut membuat Real Madrid mengoleksi 24 poin dan menempati peringkat ketiga klasemen sementara. Sementara itu, Barcelona masih bertahan di puncak dengan raihan 27 poin.

Madrid Unggul Sebelum Jeda

Barcelona mencoba mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Anthony Gordon beberapa kali mengancam pertahanan Madrid, termasuk melalui tembakan pada menit keenam dan ke-14. Namun, kiper Andriy Lunin mampu menggagalkan kedua peluang tersebut.

Madrid juga memberikan respons melalui Arda Guler. Tembakkannya dari luar kotak penalti pada menit ke-17 berhasil ditepis Joan Garcia.

Gordon kembali memperoleh kesempatan pada menit ke-33, tetapi upayanya belum mampu mengubah kedudukan.

Saat babak pertama mendekati akhir, Madrid justru berhasil

memecah kebuntuan. Pada menit ke-41, umpan silang mendarat Yann Diomande berusaha dihalau Gerard Martin. Bola kemudian mengenai Mbappe dan memantul masuk ke gawang Barcelona.

Gol tersebut membawa Madrid unggul 1-0 hingga turun minum.

Raphinha Samakan Kedudukan

Memasuki babak kedua, Barcelona meningkatkan tekanan untuk mengejar keteringgalan. Upaya tuan rumah membuahkan hasil pada menit ke-61 ketika Raphinha melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti yang berujung gol.

Skor berubah menjadi 1-1 dan membuat pertandingan semakin terbuka. Barcelona terus berusaha membalikkan keadaan, sedangkan Madrid berupaya menjaga keseimbangan permainan di tengah tekanan tuan rumah.

Gerard Martin hampir membawa Barcelona berbalik unggul. Sundulan bek berusia 24 tahun itu mengarah ke gawang, tetapi Lunin melakukan penyelamatan penting tepat di garis gawang.

Peluang tersebut gagal dimanfaatkan Barcelona untuk menambah gol. Di sisi lain, Madrid tetap mencari celah melalui serangan balik dan pergerakan para pemain depannya.

Mbappe Pastikan Kemenangan Madrid

Ketika pertandingan mendekati akhir, Madrid berhasil menemukan gol yang menentukan hasil El Clasico.

Pada menit ke-88, Eduardo Camavinga mengirimkan umpan tarik yang diselesaikan Mbappe menjadi gol.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



SPORT

Real Madrid Hajar Barcelona 2-1 di El Clasico

Oleh Redaksi · 26 Okt, 06.29 WIB



BANDA ACEH, BARCELONA — Kylian Mbappe menjadi penentu kemenangan Real Madrid atas Barcelona dalam laga El Clasico pekan ke-10 LaLiga 2026/2027. Bermain di Camp Nou, Senin (26/10/2026) dini hari WIB, Madrid menundukkan tuan rumah dengan skor 2-1.

Mbappe mencetak dua gol untuk membawa Los Blancos meraih tiga poin penting dalam persaingan papan atas Liga Spanyol. Barcelona sempat menyamakan kedudukan melalui Raphinha pada babak kedua, tetapi gol Mbappe menjelang akhir pertandingan memastikan kemenangan tim tamu.

Hasil tersebut membuat Real Madrid mengoleksi 24 poin dan menempati peringkat ketiga klasemen sementara. Sementara itu,

Barcelona masih bertahan di puncak dengan raihan 27 poin.

Madrid Unggul Sebelum Jeda

Barcelona mencoba mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Anthony Gordon beberapa kali mengancam pertahanan Madrid, termasuk melalui tembakan pada menit keenam dan ke-14. Namun, kiper Andriy Lunin mampu menggagalkan kedua peluang tersebut.

Madrid juga memberikan respons melalui Arda Guler. Tembakkannya dari luar kotak penalti pada menit ke-17 berhasil ditepis Joan Garcia.

Gordon kembali memperoleh kesempatan pada menit ke-33, tetapi upayanya belum mampu mengubah kedudukan.

Saat babak pertama mendekati akhir, Madrid justru berhasil

memecah kebuntuan. Pada menit ke-41, umpan silang mendarat Yann Diomande berusaha dihalau Gerard Martin. Bola kemudian mengenai Mbappe dan memantul masuk ke gawang Barcelona.

Gol tersebut membawa Madrid unggul 1-0 hingga turun minum.

Raphinha Samakan Kedudukan

Memasuki babak kedua, Barcelona meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tuan rumah membuahkan hasil pada menit ke-61 ketika Raphinha melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti yang berujung gol.

Skor berubah menjadi 1-1 dan membuat pertandingan semakin terbuka. Barcelona terus berusaha membalikkan keadaan, sedangkan Madrid berupaya menjaga keseimbangan permainan di tengah tekanan tuan rumah.

Gerard Martin hampir membawa Barcelona berbalik unggul. Sundulan bek berusia 24 tahun itu mengarah ke gawang, tetapi Lunin melakukan penyelamatan penting tepat di garis gawang.

Peluang tersebut gagal dimanfaatkan Barcelona untuk menambah gol. Di sisi lain, Madrid tetap mencari celah melalui serangan balik dan pergerakan para pemain depannya.

Mbappe Pastikan Kemenangan Madrid

Ketika pertandingan mendekati akhir, Madrid berhasil menemukan gol yang menentukan hasil El Clasico.

Pada menit ke-88, Eduardo Camavinga mengirimkan umpan tarik yang diselesaikan Mbappe menjadi gol.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



Melalui karya jurnalistik visual tersebut, Chaideer berharap persoalan kerusakan hutan dan lingkungan di Sumatra mendapat perhatian lebih luas, sekaligus mendorong kesadaran publik terhadap pentingnya menjaga ekosistem untuk mengurangi risiko bencana di masa depan.[]

Bagian Tengah dan Ekspansi Kolonial: Selama masa kolonial, Inggris berusaha membangun zona penyangga yang lebih luas di antara Tibet ...

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



www.harianaceh.co.id · Senin, 26 Oktober 2026 · Halaman 22 dari 26

EKONOMI

Panas! Ekspor Gas Dipangkas, Singapura Ancam ‘Potong’ Kabel Internet Indonesia

Oleh Redaksi · 26 Okt, 21.23 WIB



BANDA ACEH - Ketegangan antara Indonesia dan Singapura kembali menjadi sorotan setelah politikus Singapura, Calvin Cheng Ern Lee, mengunggah pernyataan bernada sindiran mengenai ketergantungan jaringan internet Indonesia terhadap negara tetangganya tersebut.

Pernyataan Calvin muncul di tengah kebijakan pemerintah Indonesia yang mulai mengurangi ekspor gas alam ke Singapura.

Meski tidak secara terbuka menyatakan akan melakukan tindakan tertentu, unggahan mantan anggota parlemen Singapura itu memancing perhatian warganet Indonesia karena menyinggung kemungkinan pemutusan kabel internet.

Melalui akun X @calvinelcheng, Calvin mengunggah infografis yang diklaim menggambarkan

ketergantungan internet Indonesia terhadap Singapura. Ia kemudian menuliskan komentar singkat yang langsung menarik perhatian publik.

"Potong?" tulis Calvin melalui akun X miliknya, seperti dikutip Disway.id, Senin (26/10/2026).

Unggahan tersebut memunculkan beragam reaksi karena infrastruktur kabel bawah laut dan jaringan internasional merupakan bagian penting dari konektivitas internet Indonesia dengan dunia.

Namun, pernyataan Calvin tidak dapat langsung dimaknai sebagai pengumuman atau keputusan resmi Singapura untuk memutus jaringan internet Indonesia.

Sampai informasi dalam bahan pemberitaan ini disampaikan, tidak terdapat keterangan bahwa pemerintah Singapura telah

mengambil kebijakan semacam itu.

Dalam infografis yang diunggah, terdapat klaim bahwa sekitar 90 persen lalu lintas internet internasional Indonesia melewati Singapura.

Angka tersebut menjadi dasar pembahasan mengenai besarnya peran Singapura sebagai salah satu pusat konektivitas digital regional.

Meski begitu, angka dalam infografis tersebut perlu diperiksa melalui sumber data independen. Lalu lintas internet internasional tidak selalu melewati satu negara atau satu jalur saja karena konektivitas dapat melibatkan berbagai kabel bawah laut, pusat data, penyedia jaringan, dan jalur penghubung lainnya.

Setelah unggahannya menuai respons, Calvin kembali memberikan penjelasan dengan nada yang

disebut sebagai sindiran. Ia menegaskan bahwa Singapura merupakan negara yang beradab dan menaati hukum.

"Kami adalah orang-orang yang beradab dan taat hukum. Jelas kami tidak akan melakukan ini (memutus jaringan internet Indonesia)," kata Calvin dalam unggahan terbarunya.

Pernyataan tersebut mendapat perhatian ratusan warganet Indonesia. Sebagian menghubungkan komentar Calvin dengan kebijakan energi Indonesia yang sedang menjadi pembahasan, khususnya pengurangan ekspor gas ke Singapura.

Meski demikian, hubungan langsung antara unggahan Calvin dan kebijakan energi Indonesia tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan waktu kemunculan pernyataan tersebut.

OPINI

Ketua KPK Bakal Babak Belur Gara-gara Nusron

Oleh Redaksi · 26 Okt, 13.36 WIB



Ketua Pemberantasan Korupsi, Seryo Budiyo. FOTO/Net.

Oleh: Rosadi Jamani((Mantan Wartawan))

AYA sering bilang, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid itu orang sakti. Ilmu para kiai menjadi amalan hariannya. Dua kali dipanggil KPK, dia cuek bebek.

Nah, sekarang bukti kesaktian mantan santri ini, justru Ketua KPK Setyo Budiyo yang bakal babak belur karena akan dilaporkan ke Dewas KPK.

Dalam dunia kanuragan, pendekar sakti biasanya punya ilmu kebal senjata, bisa menghilang di balik asap, mampu berjalan di atas air tanpa takut celana basah.

Namun, Nusron tampaknya punya ilmu lebih mengerikan, ilmu panggilan tak mempan, surat datang, orangnya tetap nyaman!

Nuan bayangkan, wak! Gedung KPK berdiri megah dengan nama Merah Putih. Anggarannya Rp1,408 triliun, pegawainya 1.711 orang.

Kalau semuanya patungan membeli keris, mungkin bisa membuka padepokan di setiap kecamatan. Namun, menghadapi Nusron sendiri, KPK yang malah gemetar. Dua kali dipantati Nusron.

Dua kali dipanggil, dua kali tak hadir. Ini bukan lagi jurus menghindar biasa. Dalam film silat, lawan yang berani mengabaikan pendekar sakti biasanya langsung disambar petir dari langit.

Namun, di dunia nyata, yang muncul justru pertanyaan, mana kejantanan KPK? Jangan-jangan udah jadi banci kaleng.

Koordinator Masyarakat Anti-korupsi Indonesia (MAKI), Boya-

min Saiman, rupanya ikut panas. Ia menilai KPK terlalu lemot dan tidak tegas menyikapi ketidakadilan Nusron.

Karena itu, Boyamin mengadukan pimpinan dan penyidik KPK kepada Dewan Pengawas (Dewas).

Lho, kok jadi begini? KPK biasa memanggil orang, sekarang malah dilaporkan karena cara menangani orang yang dipanggil. Ini jurus Raja di Balik Papan Catur! Belum tentu Nusron mengeluarkan ajian apa-apa, tetapi KPK sudah mendapat pekerjaan rumah tambahan.

Boyamin menilai KPK semestinya menerbitkan surat perintah membawa agar Nusron bisa dihadirkan untuk diperiksa. Menurutnya, panggilan penyidik tidak boleh diperlakukan seperti undangan kendur. Kkalau tak sempat datang, cukup kirim salam dan amplop.

Boyamin juga menyinggung Muryanto Amin, Rektor Universitas Sumatera Utara, yang disebut pernah tidak memenuhi panggilan sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara.

Boyamin bilang Witjaksono, tidak memenuhi panggilan dalam perkara dugaan korupsi kredit macet di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Boyamin menyebut perkara LPEI berkaitan dengan kerugian negara hampir Rp1 triliun.

Menurut Boyamin, ketidaktegasan seperti ini bisa membuat saksi lain ikut membangkang.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



OTOMOTIF

AntarEs Perkuat Layanan Sewa Mobil Pendingin dengan Monitoring End-to-End

Oleh Redaksi · 26 Okt, 11.10 WIB



AntarEs memperkuat layanan sewa mobil pendingin dengan menggabungkan armada reefer, cold storage, teknologi telematics, monitoring operasional 24/7, serta sistem pelaporan pengiriman dari Proof of Pick Up hingga Proof of Delivery. FOTO/Net.

JAKARTA - AntarEs memperkuat layanan sewa mobil pendingin dengan menggabungkan armada reefer, cold storage, teknologi telematics, monitoring operasional 24/7, serta sistem pelaporan pengiriman dari Proof of Pick Up hingga Proof of Delivery.

Layanan tersebut ditopang pengalaman Agungrent dalam pengelolaan transportasi korporasi sejak 1989.

AntarEs diluncurkan pada 2024 untuk menjawab kebutuhan cold chain logistic yang tidak lagi cukup hanya mengandalkan kendaraan dengan mesin pendingin.

Perusahaan membutuhkan sistem yang dapat menjaga temperatur, memantau perjalanan, mengelola pengemudi, melihat kondisi kargo, serta menghubungkan transportasi dengan penyimpanan dan inventory.

Informasi lengkap mengenai layanan sewa mobil pendingin,

armada, teknologi, cold storage, jaringan operasional, dan solusi cold chain logistic kini tersedia melalui website resmi AntarEs.

Kehadiran website resmi pertama tersebut sekaligus memperjelas posisi AntarEs sebagai bisnis cold chain logistic yang dibangun dari pengalaman panjang Agungrent dalam mengelola transportasi dan fleet korporasi.

Sewa Mobil Pendingin AntarEs Didukung Pengalaman Fleet Agungrent

Kekuatan AntarEs tidak hanya berasal dari aset cold chain logistic yang dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir.

Di belakangnya terdapat pengalaman bisnis rental dan transportasi korporasi Agungrent dengan milestone sejak 1989, ketika Agung Raya kembali menjalankan bisnis rental mobil dengan menye-

wakan 36 unit kendaraan kepada Chevron Sumatra.

Perjalanan tersebut berkembang menjadi pengelolaan transportasi korporasi dalam skala besar.

Agungrent saat ini menyatakan memiliki lebih dari 8.000 kendaraan dan 620 customer aktif yang tersebar di Indonesia.

Ekosistem tersebut juga berkembang melalui layanan fleet management, driver services, telematics, Transportation Management System, maintenance, dan dukungan jaringan operasional.

Bagi layanan sewa mobil pendingin, pengalaman fleet management tersebut menjadi relevan karena gangguan kendaraan tidak hanya berarti keterlambatan.

Pada produk yang sensitif terhadap temperatur, downtime dapat berdampak pada kualitas barang, kepatuhan SLA, dan nilai muatan.

Karena itu, reliability kendaraan, kontrol pengemudi, preven-

tive maintenance, dan monitoring menjadi bagian penting dari layanan cold chain.

Armada Mobil Pendingin untuk Last Mile hingga Distribusi B2B

AntarEs mengembangkan armada mobil pendingin dengan berbagai ukuran dan konfigurasi untuk kebutuhan distribusi yang berbeda.

Untuk kebutuhan distribusi dalam kota, AntarEs menggunakan Isuzu Traga sebagai salah satu armada last mile delivery.

Sementara untuk kebutuhan distribusi antarkota, AntarEs menyediakan pilihan armada CDE, CDE Long, CDD, hingga CDD Long dengan kapasitas angkut yang dapat mencapai sekitar 6 ...

HIBURAN

Tega! Marbot Masjid di Lampung Cabuli Gadis Disabilitas 5 Kali di Gudang

Oleh Redaksi · 26 Okt, 13.50 WIB



BANDA ACEH – Polisi menangkap kakek berinisial JS (75), yang bertugas sebagai marbot masjid di Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan. JS ditangkap atas dugaan pencabulan dan kekerasan seksual terhadap CW (23), gadis penyandang disabilitas mental.

Parahnya, perbuatan bejat tersebut diduga telah dilakukan tersangka sebanyak lima kali di gudang masjid tempatnya bekerja.

Aksi tak terpuji ini akhirnya terbongkar setelah warga sekitar memergoki aksi tersangka saat hendak mencabuli korban di area gudang masjid pada awal Oktober 2026.

Usai tepergok warga, tersangka sempat melarikan diri dan bersembunyi di kawasan Bandar Lampung. Namun pelariannya terhenti setelah tim Unit PPA Satreskrim Polres Lampung Selatan membukukannya di rumahnya pada Rabu (21/10/2026) dini hari.

Kanit PPA Satreskrim Polres Lampung Selatan, Ipda Sigit Ponco Winarno mengatakan, tersangka mengenal korban dengan baik lantaran bertetangga dan memanfaatkan keterbatasan fisik serta mental korban untuk melancarkan aksinya.

"Tersangka diduga telah lima kali melakukan perbuatan tersebut di lokasi yang sama. Yang bersangkutan memanfaatkan kondisi korban yang menyandang disabilitas mental," kata Ipda Sigit Ponco Winarno, Senin (26/10/2026).

Kini tersangka JS telah dijemput ke sel tahanan Mapolres Lampung Selatan untuk pemeriksaan intensif. Polisi menjerat tersangka dengan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) juncto Pasal 473 Ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ISLAM

Ubah Definisi Korupsi, Demi Lindungi Korporasi

Oleh Rut sw · 26 Okt, 11.28 WIB



Di tengah godaan materi dari berbagai arah, integritas adalah benteng utama. Seorang pejabat berprinsip tidak menutup mata terhadap kebenaran, tetapi menutup diri dari korupsi. Karena menolak suap bukan sekadar kewajiban, tapi kehormatan. FOTO/Net.

ETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengubah penafsiran definisi korupsi di Indonesia agar tidak lagi bertumpu semata-mata pada unsur kerugian negara. Melainkan adanya bribery atau penyuapan.

Luhut menegaskan bahwa rekomendasi penyempurnaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) tidak menghapus kerugian keuangan negara dari rumusan tindak pidana korupsi dan Pasal 2 serta Pasal 3 UU Tipikor/Pasal 603 dan 604 KUHP tetap dipertahankan.

Rekomendasi DEN berfokus pada dua hal.

Pertama, memperjelas unsur pembuktian agar penegakan hukum lebih pasti, objektif, dan konsisten.

Kedua, memperluas jangkauan pemberantasan korupsi melalui adopsi delik-delik dalam United Nations Convention against Corruption (UNCAC) yang belum diatur dalam hukum nasional.

Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan Luhut. Perubahan definisi ini menurut Luhut penting agar penanganan korupsi di Indonesia dilakukan berdasarkan standar internasional.

Sehingga, Danantara bisa mengeluarkan keputusan bisnis tanpa takut terjerat korupsi ketika ada kerugian negara.

Indonesia menurut Luhut satu-satunya negara yang mendefinisikan korupsi sebagai kerugian negara.

Luhut juga mengusulkan penyelesaian hukum dengan standar internasional (UNCAC) serta per-

lindungan hukum bagi pejabat yang beriktikad baik.

Yang dimaksud UNCAC atau United Nations Convention Against Corruption adalah konvensi PBB melawan korupsi yang diadopsi pada 9 Desember 2003.

Terdiri dari 8 Bab dan 71 Pasal. Fokus utama konvensi ini adalah pencegahan korupsi dengan mendorong integritas, transparansi, dan akuntabilitas sektor publik serta swasta.

Konvensi ini mewajibkan negara pihak untuk menjadikan berbagai bentuk korupsi sebagai tindak pidana baik suap, penggelapan, pencucian uang, hingga penyalahgunaan pengaruh).

Dan Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dengan memberikan reservasi pada Pasal

66 ayat (2) terkait penyelesaian sengketa.

Lantas apa gunanya ratifikasi jika beberapa kejahatan yang terkatagori korupsi justru diperhalus atau dihilangkan? Dengan jelas konvensi itu memasukkan penyalahgunaan pengaruh sebagai bagian dari korupsi.

Nyatanya hari ini para pejabat yang notabene punya kewenangan yang signifikan adalah yang menjadi pelaku korupsi.

Kapitalisme Dicabut, Korupsi Zero

Negeri ini sungguh aneh, kemiskinan kian ekstrem solusinya ubah angka standar, stunting solusinya MBG. Panjangnya rakyat distribusi solusinya KDMP. Hingga tindakan korupsi harus dibedakan antara ada suap atau tidak dan masuk kerugian negara atau tidak.

EDUKASI

Dayah Wakaf Barbate Gelar Khataman Al-Qur'an 30 Juz dan Tasmi' Kitab, Bina 87 Santri dari 21 Kabupaten/Kota di Aceh

Oleh Hamdani · 26 Okt, 09.46 WIB



ACEH BESAR – Dayah Wakaf Barbate di bawah naungan Yayasan Wakaf Barbate Islamic City (YWBIC) menggelar rangkaian doa dan syukuran khataman Al-Qur'an 30 juz serta tasmi' kitab bagi sejumlah santri pada Ahad, 25 Oktober dan 1 November 2026.

Kegiatan tersebut menjadi bentuk rasa syukur atas capaian para santri dalam menyelesaikan hafalan Al-Qur'an dan memperdengarkan bacaan kitab yang telah dipelajari selama menempuh pendidikan di dayah.

Dayah Wakaf Barbate saat ini mendidik 87 santri, terdiri atas 71 santri tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan 16 santri tingkat Madrasah Aliyah (MA). Para santri tersebut berasal dari 21 kabupaten/kota di Aceh dengan latar belakang keluarga fakir, miskin, yatim, piatu, dan yatim piatu.

Ketua Umum YWBIC, Prof. Dr. Sofyan A. Gani, MA, mengatakan yayasan berkomitmen untuk terus menghadirkan pendidikan Islam yang memberikan kesempatan kepada anak-anak dari berbagai daerah di Aceh, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, agar memperoleh pendidikan agama yang layak.

"Khataman Al-Qur'an 30 juz dan tasmi' kitab ini menjadi salah satu wujud ikhtiar dalam membina generasi yang tidak hanya memiliki kemampuan membaca dan menghafal Al-Qur'an, tetapi juga

tekun mempelajari serta mengamalkan ilmu agama," ujarnya.

Ia berharap para santri terus meningkatkan kemampuan dan menjaga semangat belajar sehingga kelak tumbuh menjadi generasi yang berilmu, berakhlak, mandiri, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Sofyan juga mengharapkan dukungan para donatur, orang tua, dan masyarakat agar program pendidikan serta pembinaan santri di Dayah Wakaf Barbate dapat terus berjalan secara berkelanjutan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan tasmi' kitab oleh santri MTs pada Ahad, 25 Oktober 2026, mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai. Kegiatan berlangsung di Dayah Wakaf Barbate Kebun Kurma atau dayah atas.

Sebanyak 21 santri MTs kelas II dan III dijadwalkan mengikuti tasmi' kitab dalam tiga kelompok halaqah berdasarkan jumlah kitab yang diperdengarkan. Para santri akan memperdengarkan bacaan satu hingga empat kitab dalam sekali duduk.

Kitab yang menjadi materi tasmi' meliputi kitab hadis, kitab tauhid Aqidatul Awam, serta kitab tajwid Syifaul Jinan dan Tuhfatul Athfal. Kegiatan ini menjadi bagian dari pembinaan kemampuan membaca dan penguasaan kitab-kitab yang dipelajari di dayah.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



LINGKUNGAN

Jerhemy Owen Ungkap Kondisi Memprihatinkan Warga Kalimantan, Kabut Asap, Kekeringan hingga Picu Muntaber

Oleh Redaksi · 26 Okt, 08.24 WIB



BANDA ACEH - Pegiat lingkungan sekaligus konten kreator, Jerhemy Owen mengungkapkan kondisi memprihatinkan masyarakat di Kalimantan yang harus menghadapi kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan. Kondisi tersebut bahkan berdampak pada ketersediaan air bersih dan kesehatan warga.

Owen membagikan cerita tersebut melalui unggahan di akun Threads miliknya pada Sabtu (24/10/2026). Dia mengungkapkan, masyarakat di sejumlah wilayah Kalimantan harus bertahan di tengah keterbatasan air bersih dan kualitas udara yang buruk akibat kabut asap.

“Kebayang gak, di negara kita yang indah ini ada masyarakat di kalimantan yang harus berhadapan

dengan asap dan kekeringan,” tulis Owen, dikutip Minggu (25/10/2026).

Dia juga menceritakan kondisi warga yang terpaksa menggunakan air secara berulang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan, menurut cerita seorang relawan di Kalimantan Tengah yang diterimanya, banyak warga mengalami muntaber akibat persoalan sanitasi.

“Mandi seminggu 1x. Air dipakai berulang-ulang. Setelah mandi, air dipakai untuk masak, cuci baju, cuci piring... Tadi diceritain sama relawan di Kalimantan Tengah kalau kondisi mereka udah banyak yang sakit muntaber karena masalah sanitasi ini... sakit banget denger nya,” tulisnya.

Tak hanya persoalan air bersih, Owen turut memperlihatkan sejumlah potret kondisi langit di Kalimantan yang diselimuti kabut asap. Dalam foto yang dibagikan, langit terlihat berubah menjadi kuning hingga oranye akibat pekatnya asap.

Owen juga membagikan hasil pengukuran partikel halus PM2.5 yang disebutkan menyentuh angka 3.000 lebih di Kalimantan Tengah. Dia membandingkan angka tersebut dengan standar yang disebutkan sebagai batas normal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

“Hari ini kualitas udara Kalteng sentuh level 3000++ untuk PM2.5 nya... standar normal WHO di bawah 35.... artinya ini 100x lipat,” beber Owen.

Menurut Owen, kondisi tersebut sangat memprihatinkan, terlebih masyarakat setempat harus menjalani aktivitas sehari-hari di tengah kabut asap selama berbulan-bulan.

Dia mengaku baru empat hari berada di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, tetapi sudah merasakan dampak berupa sesak napas dan batuk. Pengalaman itu membuatnya membayangkan betapa berat kondisi yang harus dihadapi warga yang telah berbulan-bulan terpapar kabut asap.

“Baru 4 hari di Palangka Raya udah sesak dan batuk”. Gak kebayang warga di sini 4 bulan dalam kondisi gini. Cepat pulih semua. Jaga kesehatan ya,” tulis Owen.

ISLAM

Musim Protes, ke Mana Arah Pemikiran Kritis

Oleh Lulu Nugroho · 26 Okt, 07.00 WIB



Paradoks protes mahasiswa - di satu sisi ada aspirasi sah yang perlu disampaikan, di sisi lain ada ancaman penyimpangan akibat lenahnya fondasi pemikiran. Sosok mahasiswa di tengah

KSI protes mahasiswa berlangsung pertengahan hingga akhir Oktober 2026, serentak di beberapa kota, seperti Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, dan Pontianak.

Gelombang aksi ini diinisiasi oleh berbagai elemen, termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), BEM UI, dan Aliansi Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) yang mengkritisi pengaturan negara sepanjang dua tahun ini, serta desakan penanganan bencana kabut asap (karhutla).

Aksi semacam ini tak hanya di negeri sendiri, namun terjadi pula di berbagai negara Eropa, dari Prancis hingga Italia. Generasi muda ramai menggugat kenaikan harga kebutuhan pokok, mahalnya biaya pendidikan dan sewa rumah, upah rendah, sempitnya lapangan kerja, serta kerusakan ekologis.

Meski beda negara, tetapi kegelisahan mereka sama, yaitu pengusa yang tak lagi mengurus persoalan rakyat dengan benar. Anak-anak bangsa ini menghadapi krisis berlapis. Sementara janji kehidupan lebih baik tak kunjung datang, hingga masa depan mereka pun tak lagi tergambar jelas.

Kegelisahan mereka bukan hanya merupakan masalah individu, melainkan menjadi masalah bersama di seluruh belahan dunia. Generasi menjadi satu frekuensi, yang akhirnya lantang menyuarakannya ke ruang publik.

Hanya saja tak jarang aksi turun ke jalan tersebut, disusupi oknum nakal yang memanfaatkan situasi untuk memperkeruh suasana dan menciptakan situasi rusuh. Akibatnya berujung pada kekerasan, kriminal, perusakan fasum, bahkan mengancam nyawa.

Sebenarnya kebebasan berpendapat melalui aksi massa adalah satu hal yang wajar dan diatur dalam UUD 1945 pasal 28. Akan tetapi saat terjadi anarkis, maka pihak keamanan akan turun tangan, memperketat pengamanan dan mencegah dengan imbauan kepada orang tua agar pelajar tak terlibat aksi yang membahayakan.

Sebagaimana terjadi beberapa waktu lalu saat Polres Metro Bekasi Kota mengamankan tiga pelajar pengelola atau admin dua akun Instagram yang tergabung dalam satu grup berisi 76 akun. Diduga kuat mereka memobilisasi sekitar 80 pelajar sejumlah SMK untuk berkumpul di kawasan Harapan Indah, berangkat menuju Jakarta menggunakan truk terbuka. (Kompas.com, 19-10-2026)

Aksi semacam ini pun bisa jadi merupakan realisasi premanisme yang tertanam di benak para pelajar. Usia remaja yang sedang mencari jati diri, kerap kali belum menemukan bentuk yang jelas. Basis pemikiran mereka juga belum kuat, sehingga mudah ditunggangi pemikiran rusak.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



REDAKSI

PENERBIT	PT. Harian Aceh Indonesia
PEMIMPIN REDAKSI	Muhammad Saman
REDAKTUR PELAKSANA	Adam
REDAKTUR	Hayat
SEKRETARIS REDAKSI	Ola
Jurnalis	
Banda Aceh:	
1. IRWAN SAPUTRA - NOMOR	12334-PWI/WDa/DP/XII/2017/01/01/912.
2. Hamdani	
Bireuen:	
1. M. Ilham Sakubat	
Lhokseumawe:	
1. Yoppi	
Aceh Barat:	
1. Kurniawan	
Jawa Timur:	
1. Rut Sriwahyuni	
Fotografer:	
1. Mishabul Amin	
2. Nazaruddin	
Social Media Manager:	
1. Syukur M. Amin	